

“LORONG GARDEN”

**(SUATU ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR DI
KELURAHAN PA’BAENG-BAENG KECAMATAN TAMALATE)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Strata Satu Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.

Oleh:
RAHMAT
NIM: 30600113205

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

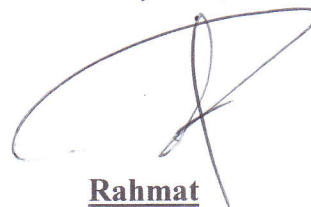
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat
Nim : 30600113205
Tempat/tgl lahir : Malaysia , 30 September 1993
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Jl. Andi Tonro Lrg. 6 No.14 B, Makassar
Judul : **“Lorong Garden” Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karnanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2017

Penyusun,



Rahmat

Nim : 30600113205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

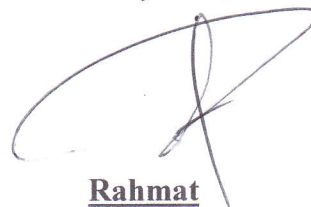
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat
Nim : 30600113205
Tempat/tgl lahir : Malaysia , 30 September 1993
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Jl. Andi Tonro Lrg. 6 No.14 B, Makassar
Judul : **“Lorong Garden” Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karnanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2017

Penyusun,



Rahmat

Nim : 30600113205



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Makassar tel. (04110864924,
fax, 864923 kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.63. Samata, (gowa)
tel. (04110) 424835, Fax, 424836

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **RAHMAT**, NIM: 30600113205, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul: **"LORONG GARDEN (Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate)"**. Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk melakukan Ujian Munaqasah.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dipergunakan dan di proses lebih lanjut.

Samata, 10 Agustus 2017

Penguji I

Syahrir Karim, M.S.i., Ph.D.
NIP : 196408151993031003

Penguji II

Nur. Aliyah Zainal, S.IP., M.A
NIP : 19780528 2011012 004

Pembimbing I

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP : 19750312 200604 1 001

Pembimbing II

Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP : 19750906 200501 2 005

Ketua Jurusan

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP : 19750312 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Makassar tel. (04110864924,
fax, 864923 kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.63. Samata, (gowa)
tel. (04110) 424835, Fax, 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **RAHMAT**, NIM: 30600113205, Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul: **"LORONG GARDEN (Suatu Analisa Terhadap Implementasi Kebijakan Walikota Makassar DiKelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate)"**. Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk melakukan Ujian Hasil.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dipergunakan dan di proses lebih lanjut.

Samata, 19 Juli 2017

Pembimbing I

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP : 19750312 200604 1 001

Pembimbing II

Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si.
NIP : 19750906 200501 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ketua Jurusan

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.
NIP : 19750312 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “LORONG GARDEN” (Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate) yang disusun oleh RAHMAT, Nim: 30600113205, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 13 September 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abdullah M, Ag.	
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.	
Munaqisy I	: Syahrir Karim, M.Si., Ph.D.	
Munaqisy II	: Nur. Aliyah Zainal, S.IP., M.Si	
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	
Pembimbing II	: Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si	

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh Natsir, MA
NIP. 19590704 1989031 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim..

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu....

Syukur Alhamdulillah, sujud syukur atas diri-Nya yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dengan kemuliaan-Nya atas kesehatan, ilmu pengetahuan, rejeki dan nikmatnya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, setelah mengikuti proses belajar, pengumpulan data, bimbingan sampai pada pembahasan dan pengujian skripsi dengan judul “Lorong Garden” (Suatu Analisa Terhadap Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate. Skripsi ini merupakan syarat akademisi dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Politik , Fakultas Ushuluddin , Filsafat dan Politik, Universitas Negeri Alauddin Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan serta penulis menyadari betul bahwa dengan doa, keikhlasan serta usaha InsyaAllah akan diberikan kemudahan oleh Allah Swt dalam penyelesaian skripsi ini. Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Penulis mengahaturkan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kekuasaannya juga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Tercinta Bakri Kuse dan Ibunda Suhaedah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restu yang tulus tak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materi. Penulis juga banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa menjadi inspirasi, memotivasi, mendukung baik secara moril dan materi penulis menjadi seorang yang bisa menuntut ilmu. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari , M.S.i, selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H.Muh Natsir, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Tasmin, Dr.Mahmudin dan Dr. Abdullah S.Ag, selaku Para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Pembimbing I penulis dan Dr. Anggraini Alamsyah, S.IP, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah senantiasa membantu memberikan arahan, semangat dalam menyusun skripsi

dengan sabar dan kerendahan hati serta keikhlasannya membimbing penulis yang sangat sibuk.

5. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D, Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penguji I penulis dan Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA, selaku penguji II yang akan senantiasa memberikan masukan , bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan Terima Kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin , Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan bekal intelektual selama penulis berada dibangku kuliah.
7. Ucapan Terima Kasih kepada Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh urusan persuratan penulis .
8. Bapak Kepala Lurah Pa’Baeng-Baeng dan Seluruh Staff Kelurahan yang membantu memberikan data-data dan informasi kepada penulis selama penelitian sampai kepada menyusun skripsi.
9. Bapak dan Ibu warga kelurahan Pa’baeng-baeng yang menjadi informan peneliti , atas kesediaannya untuk diwawancarai dan data-data informasi yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
10. Terima Kasih Kepada Pimpinan Manegement , seluruh Manager dan Karyawan seajaran PT. Lotte Shopping Indonesia yang senantiasa

mendukung setiap karyawan yang ingin keluar mengasah intelektual dalam hal ini kuliah, dan khususnya Ibu Syahraeni S.IP selaku Manager Dryfood PT Lotte Shopping Indonesia yang senantiasa memberikan penulis kesempatan untuk mengabdikan bekerja selama 4 tahun, mensupport, memotivasi serta tidak pernah bosan mendengarkan izin penulis setiap ingin ke kampus dimana jadwal bertabrakan.

11. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat dalam hal ini Muh.Yaya Gust.D.Riah S.Kom, Muh. Nur Assabil, Muh. Akbar dan Seluruh Sahabat yang tidak sempat saya sebutkan/tulis satu persatu yang senantiasa membantu meminjam fasilitas materi dan sebagainya ketika penulis dilanda krisis.
12. Terima kasih kepada seluruh teman sekelas IPO 11/12 atas kebersamaannya selama bergelut di dunia Universitas . Saya doakan seluruh teman-teman barokah gelarnya dimasa depan.
13. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya jurusan Ilmu Politik Angkatan 2013.
14. Kepada rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Black Panther Karate dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang senantiasa membentuk fisik dan pribadi penulis.
15. Dan kepada adik-adik saya tercinta yang senantiasa memberikan keceriaan, semangat selama penulis berproses menyelesaikan skripsi .

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang terbaik kepada semuanya. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis, serta kepada para pembaca .

Amin Allahumma Amin...



Samata, 18 Agustus 2017

RAHMAT.
NIM: 300600113205

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Karya Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Kebijakan Publik	15
2. Implementasi Kebijakan.....	16
3. Persepsi.....	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Metode Pengumpulan Data	24
D. Instrumen Penelitian.....	26
E. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data.....	27
F. Pengujian Keabsahan Data	29
G. Kerangka Konseptual.....	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Kota Makassar	32
2. Keadaan Geografis	32
3. Kependudukan	35
4. Profil Kelurahan Pa’Baeng-Baeng	36
B. Kebijakan Lorong Garden	48
1. Lahirnya Kebijakan	48
2. Fenomena Sosial Masyarakat Kota	50
3. Implementasi Kebijakan Lorong Garden Di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng	53
C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Pa’Baeng-Baeng Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang “Lorong Garden”	64
1. Kurangnya Sosialisasi	65
2. Lorong Garden Tanpa Pemberdayaan	67
3. Apatis/Skeptis	69
4. Munculnya Badan Usaha Lorong (Bulo) Sebagai Tumpang Tindihnya kebijakan	71
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi penelitian	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel. 1

Luas Wilayah Administratif Kota Makassar..... 33

Tabel.1.2

Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar.....35

Tabel. 1.3

Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Makassar
2013, 2014 dan 2015..... 35

Tabel.2.1

Jumlah Penduduk..... 38

Tabel.2.2

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Pa'baeng-baeng..... 41

Tabel.2.3

Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kelurahan Pa'baeng-baeng 2016..... 43

Tabel.2.4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan..... 45



ABSTRAK**Nama : RAHMAT****Nim : 30600113205****Prodi : ILMU POLITIK****Judul : “LORONG GARDEN” (SUATU ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA MAKASSAR DI KELURAHAN PA’BAENG-BAENG KECAMATAN TAMALATE)**

Skripsi ini membahas Kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah dan instansi terkait dalam pengimplementasian program Lorong Garden di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate serta untuk mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat di kelurahan pa’baeng-baeng kecamatan tamalate terhadap kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, media cetak, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian, serta menggunakan teori kebijakan dan teori implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate belum maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat, masih terdapatnya beberapa kendala dan kekurangan yang harus di perbaiki, seperti masih kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat, tidak adanya pemberdayaan, minimnya anggaran yang diberikan, kurang aktifnya instansi yang bertanggungjawab dalam hal ini berkaitan dengan implementor yang kurang personil, tidak konsisten, saling ketergantungan, akses lingkungan yang begitu sempit, tidak terlalu memadainya sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang, apatis/skeptis sehingga implementasi belum berjalan dengan baik dan merata. Selanjutnya mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate tentang Lorong Garden sangat bervariasi, mulai dari pemahaman bahwa Lorong Garden merupakan program ingin mengubah lorong menjadi bersih, hijau, indah, asri dan bernilai ekonomi serta masih banyak masyarakat yang kurang paham akan istilah lorong Garden dikarenakan kurangnya sosialisasi, informasi dan perhatian pemerintah setempat.

Implikasi dari penulis bahwa dalam struktur birokrasi pemerintah sebagai penanggung jawab melalui instansi yang terkait dengan Program Lorong Garden ini agar lebih serius, konsisten, aktif bersosialisasi dan tidak saling ketergantungan dalam pengimplementasian dilapangan serta sikap dan kerjasama masyarakat yang senantiasa terus ditingkatkan dalam hal swadaya.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi dan Persepsi Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah atau Negara merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kehidupan warga Negara, sejahtera atau melaratnya warga akan menentukan kualitas mereka yang berkuasa.¹ Setiap Negara memiliki visi kemanusiaan, setidaknya dalam rumusan konstitusi Negara seperti istilah *Welfare state*, kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemakmuran dan istilah serupa lainnya. Indonesia menganut prinsip bernegara sesuai dengan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip ini memberi tugas pada Negara untuk menjalankan visi kemanusiaan dalam rangka membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketertindasan, kemelaratan, ketidakadilan, keamanan, kenyamanan dan diskriminasi.² Idealnya, Negara dengan prinsip tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan memaksimalkan potensi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan atau program pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong partisipasi masyarakat tersebut untuk aktif bersama-sama demi tercapainya cita-cita kolektif berkehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sejahtera.

Kebijakan publik yang dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik merupakan sesuatu yang krusial untuk dipelajari dengan alasan: Pertama, untuk melihat sejauh mana isi kebijakan publik mampu

¹ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik*, (Makassar, Lab. Ilmu Politik Uin Aalauddin Makassar, 2015), h.223

² Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Politik Profetik*, h.235

memuat nilai-nilai dan kepentingan publik khususnya kelompok sasaran. Kedua, untuk mengkritisi formulasi kebijakan publik yang menyangkut: (a) apakah kebijakan tersebut ditetapkan secara demokratis, transparan, dan akuntabel; dan (b) bagaimana peran aktor dan stakeholder dalam formulasi kebijakan. Ketiga, mengidentifikasi apa dampak dari sesuatu kebijakan publik bagi individu, komunitas, dan masyarakat serta pemerintah.³

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota.⁴

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan pun tak luput dari berbagai masalah, mulai dari kemiskinan karena kurangnya keterampilan, kebersihan karena kurangnya kesadaran serta keamanan dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, melalui berbagai masalah yang timbul di Kota Makassar maka Walikota Makassar periode tahun 2014-2019 Bapak Ir. Ramdhan Pomanto dan wakilnya DR. Syamsul Rizal, MSi resmi dilantik pada tanggal 9 Mei 2014 di pelataran pantai Losari menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan atau program-program, yang dimana untuk mengatasi kemiskinan muncullah kebijakan “Beras Raskin” dan jaminan sosial lainnya, Untuk mengatasi masalah kebersihan, keasrian, keamanan serta meminimalisir tindak kriminalitas muncullah yang namanya MTR “Makassar Tidak Rantasa”, Lisa “Lihat Sampah Ambil” serta

³ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 1

⁴ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*, 3-4.

Longgar “Lorong Garden” serta Sombere and Smart City Makassar yang dimana masing-masing istilah tersebut bermakna untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, keamanan dan keterampilan melalui kerja sama pemerintah melalui fasilitas yang diberikan.

Dalam menciptakan kota bersih, aman, nyama, terampil dan sejahtera saat ini Walikota Makassar telah memperkenalkan istilah Lihat Sampah Ambil (LISA), Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR), Lorong Garden (LONGGAR) dan Sombere and Smart City Makassar yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih. Sebagaimana pentingnya kebersihan menurut islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, Sebagaimana firmanNya dalam potongan Qur'an Surah Al-Baqarah(2)Ayat 222 yang berbunyi :



Terjemahnya:

*222.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan / membersihkan diri.*⁵

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padaman kata “membersihkan atau melakukan kebersihan”. Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis,

⁵Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.2012). h.35

yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam.

Secara khusus, Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَّمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)

Terjemahnya :

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi)”

Allah swt adalah zat yang baik, bersih, mulia dan bagus. Karena Allah swt menyukai hal-hal yang sedemikian. Sebagai umat islam, maka kamu harus memiliki sifat yang sedemikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal.⁶

Berfokus pada program Lorong Garden, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengatakan, Lorong adalah ibarat sel kota dan otaknya adalah pemerintah. "Sel dan otak menjadi penentu apakah kota itu bisa terus hidup, sehat atau bahkan mati. Pemerintah Kota Makassar, kata Danny, salah satu hal yang akan dijalankan pemerintahannya adalah melakukan restorasi tata ruang Kota Makassar menjadi berstandar dunia. Karena itu ia melihat perlunya melakukan restorasi atas lorong. Banyak persoalan sosial yang ada di Lorong. Mulai dari

⁶ Muhammad Sabir. *Pandangan Kesehatan Dalam Islam, (Suatu Pendekatan Hadis).* (Makassar:Alauddin University Press, 2014), h.139.

masalah begal motor, orang-orang yang derajat kesehatannya rendah, hingga banyak masyarakat miskin yang tinggal di lorong. "Maka pendekatan kita bukan komunitas, tetapi pendekatan ruang yang di dalamnya multikomunitas, jelas dia. Dijelaskannya, Lorong Garden akan dikembangkan dengan melakukan penanaman cabe. Diharapkan ini akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi masyarakat yang tinggal di lorong.⁷

Walikota Makassar ingin mengubah wajah lorong menjadi hijau dengan program Lorong Garden (Longgar), sesuai dengan visi Walikota merestorasi nasib rakyat. Program Lorong Garden tiada lain memanfaatkan lorong di sejumlah wilayah kecamatan untuk menjadi lebih produktif yang diupayakan lorong menjadi hijau dan bersih dengan menanam berbagai tanaman seperti sayuran, tomat dan cabai, sehingga meminimalisir penyakit sosial yang ada di lorong-lorong tersebut karena adanya kegiatan keseharian yang positif yang berpenghasilan serta memperbaiki psikologis masyarakat melalui pandangan yang hijau, asri, aman dan tentram. Sebagaimana dalam pandangan Islam keamanan hanya akan tercipta dengan keimanan dan dengan realisasi mewujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menggambarkan pentingnya keamanan, Allah SWT Berfirman Dalam Qur'an Surah Al-An'am Ayat 82;

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

⁷ www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/23/oimtl5318-lorong-indah-itu-bernama-lorong-garden-makassar. Diakses Pada Tanggal 01 Agustus 2017, pukul 23.10 Wita.

82. *orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*⁸

Dalam implementasinya, program-program pemerintah kota Makassar di pemerintahan Danny Pomanto begitu kaya akan jargon. Misalnya saja, Sombere and Smart City Makassar, LISA (lihat sampah ambil), termasuk *Lorong Garden* atau Makassar Tidak Rantasa (MTR) dan berbagai banjir jargon lainya, yang semoga tidak hanya berhenti pada kata-kata, namun bisa berjalan dan memiliki bukti langsung dan terasa manfaatnya bagi publik. Harapan masyarakat yang diamanahkan kepada pemerintah Kota Makassar selaku pemimpin adalah tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan didunia maupun akhirat baik itu adanya unsur ketidakadilan, diskriminasi, korupsi atau hanya sampai dengan ungkapan janji semata dalam konsep kebijakan pemerintah Kota Makassar tersebut. Sebab didalam Al-Qur'an Surah An-Anfal(8)Ayat 27:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ

تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

27. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*⁹

⁸Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.138.

⁹Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h.180.

Ayat diatas berisi tentang pentingnya menjaga amanah/janji dan larangan untuk khianat baik datangnya dari orang lain maupun Allah SWT.

Dimasa akhir jabatan Pemerintahan Walikota Makassar namun pembenahan lorong sebagai salah satu program andalanya belum terealisasi secara merata dan masih banyak Lorong yang seharusnya dibenahi belum tersentuh sedikitpun dengan program Lorong Garden, entah itu kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat atau sosialisasi pemerintah yang belum maksimal atau boleh jadi Program Lorong Garden (LONGGAR) ini belum diatur dalam peraturan daerah maupun walikota, namun hanya berhenti sebagai salah satu turunan dari Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.¹⁰ Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, Boleh jadi sasaran program ini adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan Lorong dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah, sehingga melahirkan program yaitu Makassar Ta Tidak Rantasa telah melaksanakan program Gemar MTR ini dan sebagai turunan melahirkan program Lorong Garden dengan target pembenahan Lorong bisa tercapai 80% pembenahan di Tahun 2016 dari 7.520 lorong yang ada di Kota Makassar. Dalam RPJMD indikator keberhasilan program ini adalah Masyarakat Kota Makassar merasa puas terhadap pengelolaan sampah dan pembenahan

¹⁰Novri Ardi Wiranata Nur. *Analisis Pelaksanaan Program Makassar Ta' Tidak Rantasak Di Kota Makassar, Skripsi* (Makassar:Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Hasanuddin,2015),h.33

lorong ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah kecamatan dan kelurahan se-Kota Makassar.

Berangkat dari Latar belakang diatas, fenomena yang ada bahwasanya pembenahan lorong di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah salah satu masih banyak yang belum direalisasikan atau disosialisasikan pemerintah serta masih banyak lorong yang membutuhkan perhatian namun jauh daripada itu . Beberapa lorong-lorong disekitaran Kelurahan Pa'baeng-baeng masih tetap seperti dulu yang dimana belum ada pembenahan yang signifikan atau istimewa.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan dan judul diatas maka adapun rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan “Lorong garden” di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate?
2. Bagaimanakah Persepsi Masyarakat di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang “Lorong Garden”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang di permasalahan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan “Lorong Garden” di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate?
2. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Tentang “Lorong Garden”.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat sarjana satu (S1) program studi ilmu politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik dan juga Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Dari segi teoritis, untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang Kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate tentang Kebijakan “Lorong Garden”.
3. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat atau menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Uin Alauddin Makassar dan bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta dapat dijadikan sumber acuan dan pedoman bagi pihak pemegang dan pelaksana pemerintahan Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Karya Terdahulu

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini maka ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait judul diatas yaitu :

“Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang” (Jurnal) Oleh Ellen Landriany. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan, mendeskripsikan faktor pendukung, mendeskripsikan faktor penghambat, dan memberikan deskripsi dalam mengatasi hambatan program adiwiyata pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 dan 10 di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup di sekolah sudah dituangkan dalam surat keputusan dan terintegrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Kemudian mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak bahwa sekolah tersebut benar-benar sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan adiwiyata, seperti satuan tugas yang tidak tepat waktu serta ada sekelompok siswa yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan,

dan dukungan masyarakat serta instansi lain yang masih rendah. Sekolah sudah melakukan langkah-langkah strategi guna mengatasi hambatan.¹¹

“Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Terhadap Kebijakan Makassar Tidak Rantasa’ Di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala” Oleh Reski Pratiwi Handayani. Jenis penelitian ini ialah bersifat kualitatif yaitu penelitian berakar pada latar alamiah , observasi, wawancara langsung sebagai keutuhan serta alat penelitian yang memakai metode pengumpulan data ,dan mengandalkan analisis data.

Dari hasil penelitian. Pertama, Implementasi Makassar Tidak Rantasa’ atau MTR belum maksimal dilaksanakan oleh aparat pemerintah, termasuk persiapan sarana dan prasarana yang memperoleh proses implementasi MTR. Kedua, respon atau persepsi masyarakat terhadap MTR sangat beragam dari warga masyarakat ada yang mendukung dengan sungguh-sungguh, ada apatis/skeptis dan berbagai persepsi lainnya. MTR memperoleh gebrakan pemerintah untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif.¹²

“Kebijakan Publik yang Partisipatif dan Komunikatif” (Jurnal) Oleh Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng, dan Ayi Karyana. Penelitian yang bertujuan menganalisis bagaimana proses penetapan kebijakan perencanaan kota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkal pinang khususnya dalam bidang transportasi. Kebijakan tersebut adalah kebijakan satu arah (*one way*) yang diberlakukan pada tahun 2011 pada ruas jalan tertentu. Kajian dilakukan untuk

¹¹ Ellen Landriany. *Implementasi Kebijakan Adiwijaya Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* , (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014).

¹² Reski Pratiwi Handayani. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Terhadap Kebijakan Makassar Tidak Rantasa’ Di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala. Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

mengetahui apa saja hambatan penerapan kebijakan perencanaan kota yang partisipatif dan komunikatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan analisis deskriptif dan menggunakan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan jalan satu arah yang dilaksanakan Pemkot kurang partisipatif. Tidak semua pihak terkait merasa dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Pemkot juga tidak merespon keinginan DPRD Kota untuk menunda implementasi kebijakan tersebut karena ditemukan banyak permasalahan pada tahap uji coba. Komunikasi yang dijalin oleh Pemkot juga kurang efektif sehingga sosialisasi kebijakan tersebut tidak maksimal.¹³

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Di Kota Gorontalo” (Jurnal) Oleh Arifin Tahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai serta struktur organisasi Komisi Transparansi yang tidak berbelit-belit disamping itu pula responsivitas pemerintah serta tingkat penerimaan masyarakat yang positif. Sedangkan sikap aparatur yang kurang memahami kebijakan transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses

¹³ Yuli Tirtariandi El Anshori, Dkk. *Kebijakan Publik Yang Partisipatif dan Komunikatif*. Jurnal Kebijakan Publik, (Banten: FISIP Universitas Terbuka, 2011).

kebijakan transparansi. Hal-hal yang disarankan dalam penelitian sebagai berikut ;

1) Perlu komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud, 2) Bahwa Perda Nomor 3 tahun 2002 yang merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan transparansi masih memerlukan derivasi kebijakan untuk mengoperasionalkan perda dimaksud., 3) Mengingat bahwa kota Gorontalo telah menjadi *icon* dalam *Good Governance* khususnya dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, maka diharapkan konsistensi dan konsekwensi dalam hal implementasi kebijakan transparans yakni Perda Nomor 3 Tahun 2002. ¹⁴

“Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik Di DPRD Kota Manado” (Jurnal) Oleh Frans C. Singkoh. Peran elit politik DPRD dapat dilihat dari aktivitas tugas dan fungsinya yakni sebagai pemberi legislasi, menetapkan anggaran (APBD) serta sebagai kelompok yang mampu memberikan control terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pemberi legitimasi, elit politik DPRD di lihat dari perannya dalam membuat peraturan daerah (Perda), sebagai pemberi legitimasi elit politik memiliki kepentingan dalam menetapkan anggaran terutama dalam menetapkan APBD serta sebagai pemberi legitimasi dalam melaksanakan control (pengawasan) atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti terlibat sebagai instrument kunci. Pelibatan peneliti sebagai instrument kunci merupakan totalitas jiwa dan raga dalam mengamati, bertanya, melacak, mamaknai dan menganalisis segala sesuatu yang

¹⁴ Arifin Tahir. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Di Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012).

terjadi di lokasi penelitian. Peneliti berupaya untuk mencatat apa yang dilihat dan mencatat apa yang informan pikirkan dan rasakan melalui perkataan. Jumlah informan seluruhnya sebanyak 7 orang. Data/informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dilengkapi teknik observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yaitu model analisis interaktif, kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukkan : bahwa Elit politik mampu menetapkan kebijakan publik sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terlaksananya pembangunan di daerah, sehingga dapat memberikan kestabilan dan kesejahteraan pada masyarakat. DPRD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat di Kota Manado dalam melaksanakan fungsinya terutama fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah menunjukkan peran yang baik sekalipun belum maksimal namun sudah cukup efektif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik belum maksimal. Terlihat secara tersamar “dominasi” eksekutif sangat kuat sehingga terjadi musyawarah untuk mufakat. Saran yang dapat diajukan yaitu sebaiknya Bupati/Walikota tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua partai politik; Perlu adanya ketentuan/peraturan yang ditaati serta sanksi yang tegas jika terjadi penyalahgunaan jabatan.¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hanya terletak pada program kerja itu sendiri serta dimensi ruang dan waktu dan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Makassar Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate. Untuk itu, peneliti akan mencoba melihat tentang Implementasi kebijakan serta Persepsi Masyarakat

¹⁵ Frans C. Singkoh. *Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik di DPRD Kota Manado*. (Manado: Jurnal Eksekutif, 2012).

Terhadap Kebijakan Walikota Makassar dari segi penataan Lorong-lorong yang ada di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate secara mendalam. Kemudian Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah yang sama-sama untuk menjawab permasalahan yang ada dimasyarakat serta untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan ini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁶

Mewujudkan tujuan bangsa bukanlah hal yang mudah. Perlu usaha yang serius dan konsisten. Pencapainnya pun harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia melalui kegiatan pembangunan serta perubahan.

Perubahan melalui pembangunan dan sebagainya dalam masyarakat Indonesia merupakan upaya seluruh masyarakat untuk melakukan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang adil, makmur, aman, sejahtera, dan sentosa. Perwujudan makna pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang diiberi amanat untuk melaksanakannya. Upaya pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia salah satunya tertuang dalam bentuk kebijakan publik.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.20

Secara umum , istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat ,suatu kelompok , maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Senada dengan pandangan Dye adalah George C.Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu:

Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan public. Oleh karena itu , kita memerlukan atau konsep kebijakan public yang lebih tepat.¹⁷

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.¹⁸

¹⁷ Budi. Winamo, MA. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. (Yogyakarta: MedPress, 2007), h.16.

¹⁸ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.87.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹⁹ Dalam Pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat Variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.²⁰ (1) Secara umum, banyak ilmuwan sepakat bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu penyebar pesan, pesan dan penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bila diantara penyebar dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai ini pesan. (2) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. (3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau *SOP*).

Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Realita menunjukkan, Implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah

¹⁹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, h.89.

²⁰ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, h.90.

proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Menurut Sabatier dalam Kadji bahwa makna implementasi adalah upaya untuk dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²¹

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn adalah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaa program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat atau hubungan kausalitas yang andal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan Kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas terperinci dan Ditempatkan dalam uraian yang tepat.

²¹Erwin Zubair Gobel dan Yosef. P. Koton. *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Deepublish .2016), h. 30-31

9. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²²

Menurut Hogwood dan Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-kondisi sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, Mengapa implementasi sangat penting karena penerapan dimasyarakat sangat berpengaruh adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan. Karena tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi , dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri . Untuk melibatkan usaha dari *policy maker* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy (Lipsky)* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Maka mengapa perilaku sangat penting adalah:

1. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
2. Impementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
3. Benturan kepentingan antara aktor baik administrator,petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.
4. Selama implentasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan , target maupun strateginya.

²² Dr. Solichin Abdul Wahab,M.A, *Analisis Kebijaksanaan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 71-78.

5. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional.
6. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi
7. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan.
8. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Maka Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah daerah dari tingkat provinsi, dan kabupaten/kota suatu kewajiban untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut tidak dituntaskan secara profesional. Maka kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap.²³

3. Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama.²⁴

Persepsi Masyarakat tentang Implementasi kebijakan pemerintah tentang Lorong Garden di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota

²³ Syafiie dkk. *Hukum Etika Pemerintahan*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2001).

²⁴ Jalalluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).h,

Makassar dapat diketahui melalui bagaimana pengetahuan atau pengamatan mereka atas program Lorong Garden tersebut di kehidupan mereka sehari-hari. Boleh jadi persepsi mereka beraneka ragam tergantung latar belakang kemampuan mereka menganalisa, atau boleh jadi Dari berbagai macam persepsi masyarakat itulah yang akan menilai berjalan baik tidaknya program kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden nantinya.

Persepsi juga bisa diartikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus atau bisa dibilang persepsi merupakan daya/kemampuan seseorang untuk mengenal benda/barang. Kualitas atas hubungan serta perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui dan mengartikan setelah panca inderanya mendapat rangsangan . Jadi persepsi itu dapat terganggu oleh gangguan otak (karena kerusakan otak, keracunan , obat halusinogenik). Oleh gangguan jiwa (emosi tertentu dapat mengakibatkan ilusi, psikosa dapat menimbulkan halusinasi) atau oleh pengaruh lingkungan sosial budaya (mempengaruhi persepsi karena penilaian yang berbeda dan orang dari lingkungan sosial budaya yang berbeda pula).

Persepsi dapat mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterima individu, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan dengan demikian stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi , objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
2. Alat Indra,saraf dan pusat susunan saraf. Selain alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus, juga harus ada saraf sensorik

sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak.

3. Perhatian. Untuk menyadari dan mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek.

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf ke otak. Proses ini disebut ini disebut fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar atau diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut proses psikologis.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa saraf terlahir dari proses persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang dilihat, diraba atau didengar, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan proses persepsi seaneanya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.²⁵

²⁵ Nasution. Mahmud L. *Gangguan Persepsi Sensori. Halusinasi Pendengaran*. (USU: Digital Library, 2005),

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif²⁶. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu keadaan secara objektif bagaimana perspektif masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang ada. Dan Penelitian ini juga ingin menjelaskan dinamika tentang lorong-lorong yang ada di Kelurahan Pa'baeng-baeng terhadap kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden.

Penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari kata untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.²⁷ Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan peneliti lebih banyak menganalisis kepada bagaimana memetik kata-kata dalam hal ini jawaban informan atau subjek penelitian ketika diskusi atau wawancara tentang peristiwa yang diteliti.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.8-9.

²⁷ Prof. DR. Emzir, M.PD. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.3.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat atau kancah yang dijadikan objek penelitian.²⁸ Oleh karena itu, untuk memperjelas lokasi atau objek penelitian yang menjadi sasaran oleh peneliti adalah di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena letaknya yang strategis dan memungkinkan memperoleh data dengan mudah.

B. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi lapangan serta hasil wawancara langsung dengan narasumber yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi dan sebenarnya lapangan.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung data primer diambil dari data dokumen resmi, laporan, studi biografi atau media, yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti²⁹ yaitu Kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas

²⁸ Dr. Widodo. *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h.90.

²⁹ Lisa Horison. *Metode Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana,2009), h.91.

yang tinggi. Oleh karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Dalam penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.³⁰ Dalam hal ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Menurut Guba dan Lincoln, Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³¹ Dalam hal ini, observasi dilakukan peneliti dikelurahan pa'baeng-baeng kecamatan tamalate sebagai awal mula peneliti melihat suatu fenomena kebijakan pemerintah tentang Lorong Garden yang begitu jauh dari pengimplementasian.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

³⁰ Sitti Mania. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013).h,183.

³¹ Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Makassar: University, 2013). H.187-188

respondennya sedikit atau kecil.³² Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.³³ Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa perwakilan dari pihak pemerintah serta perwakilan dari masyarakat lorong itu sendiri untuk bagaimana dapat menganalisis implementasi kebijakan Walikota Makassar dan persepsi masyarakat itu sendiri.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.³⁴ Dalam hal ini, peneliti memakai tehnik pengumpulan data dokumenasi karena tidak lepas dari apa yang peneliti gunakan dimana peneliti mengambil referensi tidak jauh dari dokumen-dokumen yang ada dikelurahan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penetilian.³⁵ Dalam peneitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian, untuk menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki

³² Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Makassar: University, 2013). H. 184.

³³ Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, h. 184.

³⁴ Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, h.189.

³⁵ Dr. Widodo. *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h.89.

bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang teliti menjadi lebih jelas dan bermakna.³⁶ Jadi, Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri dengan bantuan berbagai pihak sebagai alat pengumpul data utama. Karena peneliti sebagai alat utama yang dapat berhubungan dengan para informan serta objek penelitian lainnya. Disini peneliti akan menghubungkan setiap data yang didapat dilapangan.. Oleh karena itu, Peneliti disini berfungsi , memilih informasi sebagai sumber data, mengelola data dan menganalisis, dan melihat kualitas data, serta membuat kesimpulan dari hasil dari penelitian tersebut. Disamping itu peneliti akan menggunakan seperangkat instrumen lainnya dalam bentuk pedoman observasi, wawancara, dokumentasi berupa kamera dan alat recording untuk mengumpulkan seluruh informasi terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Walikota Makassar di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kota Makassar.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.³⁷ Setelah memperoleh berbagai data dalam penelitian, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan dilapangan. Analisis data merupakan penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

³⁶ Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Makassar: University, 2013), H.38.

³⁷ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h.173.

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan data, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model data (Display Data)

Data yang sudah direduksi , agar lebih mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain maka data tersebut masih perlu disajikan. Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan ‘model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.³⁸ Tujuannya adalah untuk memudahkan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa, sehingga memudahkan peneliti memetik kesimpulan.

3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna sesuatu, mencatat keteraturan ,pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah dasar klasik Glasser dan Strauss Bahwasanya kesimpulan “akhir” mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang

³⁸ Prof. DR. Emzir, M.PD. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.131.

digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana-tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.³⁹

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur kredibilitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴⁰ Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu, "Lorong Garden" (Suatu Analisa Terhadap Kebijakan Walikota Makassar DiKelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate). Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Oleh karena itu, bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten dan akan lebih meningkatkan kekuatan data dibandingkan dengan menggunakan satu pendekatan saja.

Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta

³⁹ Prof. DR. Emzir, M.PD. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.133.

⁴⁰ Sitti Mania. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013),h.195.

saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁴¹

G. Kerangka Konseptual

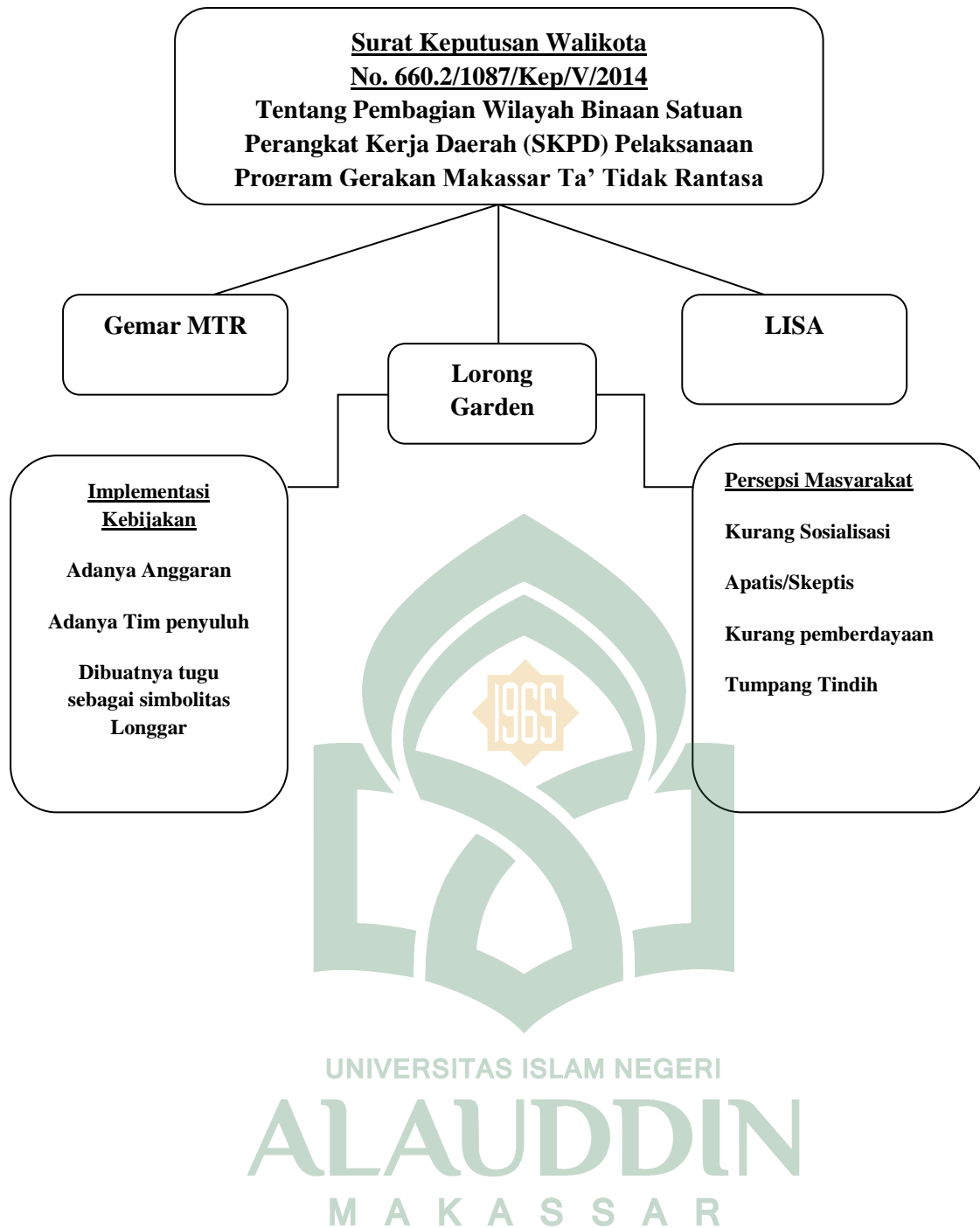
Konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. “Perilaku menyimpang” misalnya, adalah suatu konsep yang dipakai untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kejahatan dan lainnya. Dengan kata lain konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu.⁴²

Kerangka konseptual atau kerangka teoritis adalah kerangka berfikir kita yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang kita teliti. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.⁴³ Seperti alur penelitian dibawah ini

⁴¹ Sitti Mania. *Metedologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. (Makassar: University, 2013). H. 196.

⁴² Dr. Rianto Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004),h. 27.

⁴³ Dr. Rianto Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004),h. 29.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,77 km² dengan penduduk 1.223,540 sampai 1.449.401 jiwa. Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industry, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan, barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.⁴⁴

2. Keadaan Geografis

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°08'6"19 Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Maros; Selatan – Kabupaten Gowa; Barat – Selat Makassar; Timur Kabupaten Maros.⁴⁵

Kondisi topografi Kota Makassar bervariasi yaitu ketinggian Kota Makassar antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C. Kondisi iklim terbagi dua musim (musim hujan dan musim kemarau) namun waktu kemarau relatif lebih panjang dibanding musim hujan

⁴⁴ Mutmainna Armin. *Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Jumlah Pembelian Telur Ayam Buras di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar*. (Makassar: Skripsi, 2014), h.32.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*, (Makassar: Areso), 2016, h.3.

kemudian rata rata kelembapan udara sekitar 79%, temperature udara sekitar 25,10 – 29,0c dan rata – rata kecepatan angin 4,2 knot.⁴⁶

Tabel.1

Luas Wilayah Administratif Kota Makassar

Sebelah Utara	Kabupaten maros
Sebelah Selatan	Kabupaten Gowa
Sebeleh Timur	Kabupaten Gowa dan Maros
Sebelah Barat	Selat Makassar

Sumber: BPS Kota Makassar 2016 . Diakses melalui dokumen kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Pada tahun 2015, Jumlah Kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 143 kelurahan, 996 RW dan 4968 RT.

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Pada akhir tahun 2015, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km²), Mamajang (2,25 km²), Tamalate (20,21 km²), Rappocini (9,23 km²), Makassar (2,52 km²), Ujung Pandang (2,63 km²), Wajo (1,99 km²), Bontoala (2,10 km²), Ujung Tanah (5,94 km²), Tallo (5,83 km²), Panakkukang (17,05 km²),

⁴⁶ Mutmainna Armin. *Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Jumlah Pembelian Telur Ayam Buras di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar*. (Makassar: Skripsi, 2014), h.33.

Manggala (24,14 km²), Biringkanaya (48,22 km²), serta Tamalanrea (31,84 km²).⁴⁷

Tabel.1.2

Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km²) di Kota Makassar

Akhir 2015

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	2021	1150
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,50
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,10	1,19
Ujung Tanah	5,94	3,38
Tallo	5,83	3,32
Panakkukang	17,05	9,70
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar	175,77	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Makassar

Dari 14 wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Tamalate merupakan wilayah dimana lokasi penelitian berada tepatnya diKelurahan Pa'baeng-baneg. Wilayah ini terletak di bagian timur yang berada dipusat Kota Makassar

⁴⁷ Badan Pusat Statistik. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*, (Makassar: Areso, 2016),.h.7.

3. Kependudukan

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 1.449.401 jiwa yang terdiri atas 717.047 jiwa penduduk laki-laki dan 732.354 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,45 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,37 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,91.⁴⁸

Tabel.1.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan Di Kota Makassar 2013, 2014 dan 2015.

Kecamatan	Jumlah penduduk			Laju pertumbuhan Penduduk	
	2013	2014	2015	2013-2015	2014-2015
Mariso	57.790	58.827	58.815	0.88	0.84
Mamajang	60.236	60.537	60.779	0.45	0.40
Tamalate	183.039	186.921	190.694	2.07	2.02
Rappocini	158.325	160.499	162.539	1.32	1.27
Makassar	83.550	84.014	84.396	0.51	0.45
Ujung Pandang	27.802	28.053	28.278	0.85	0.80
Wajo	30.258	30.505	30.722	0.76	0.71
Bontoala	55.578	55.937	56.243	0.60	0.55
Ujung Tanah	48.133	48.531	48.882	0.78	0.72

⁴⁸Badan Pusat Statistik. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*, (Makassar: Areso, 2016),.h.64.

Tallo	137.260	137.997	48.882	0.78	0.72
Panakkukang	145.132	146.121	146.968	0.63	0.58
Manggala	127.915	131.500	135.049	2.75	2.70
Biringkanaya	185.030	190.829	196.612	3.08	3.03
Tamalanrea	108.024	109.471	110.826	1.29	1.24
Kota Makassar	1.408.072	1.429.242	1.449.401	1.46	1.41

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik.

Dari gambaran umum diatas, yang menjadi sasaran penelitian terletak pada Kecamatan Tamalate Kelurahan Pa'Baeng-Baeng yang dimana laju pertumbuhan penduduknya setiap tahun semakin meningkat.

4. Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng

a. Batas Geografis Kelurahan Pa'baeng-baeng

Berdasarkan data profil Kelurahan Pa'baeng-baeng terletak dibagian Selatan Kota Makassar dengan Luas wilayah adalah ± 84.58 Ha. Yang terbagi menjadi 2 Lingkungan dan 10 RW Serta 38 RT

Adapun batas wilayah Kelurahan Pa'baeng-baeng adalah:

- Bagian Utara : Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta-Bantaeng
- Bagian Selatan : Kelurahan Parangtambung
- Bagian Timur : Kelurahan Mannuruki, Kelurahan Bontoduri
- Sebelah Barat : Kelurahan Jongaya, Kelurahan Bongaya

b. Topografi dan Hidrologi.

Wilayah Kelurahan Pa'baeng-baeng disebut Kawasan morfologi rendah, kemudian secara spesifik wilayah Kelurahan Pa'baeng-baeng merupakan kelurahan wilayah daratan yang pemanfaatannya didominasi permukiman.⁴⁹

⁴⁹ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016. Di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20.

Kelurahan Pa'baeng-baeng merupakan kelurahan dengan tadah hujan, tidak ada aliran sungai, kanal besar, namun kondisi air tanah yang dimiliki kelurahan pa'baeng-baeng cukup baik. Sehingga masyarakat memiliki 2 sumber air bersih, yakni PDAM dan sumur gali tertutup. Dengan demikian, sumber air yang begitu mudah di akses melalui PDAM maupun air sumur gali, lebih memudahkan masyarakat untuk mengkolabirasikan dengan Program Longgar.

c. Pola Penanggulangan Lahan

Pola pemanfaatan lahan diwilayah Kelurahan Pa'baeng-baeng pada umumnya berupa pemukiman, sedangkan sisanya pemanfaatanya untuk lahan fasilitas umum seperti kantor lurah, masjid dan makam makam dan fungsi-fungsi lain seperti RTH sarana perekonomian.⁵⁰ Dalam hal ini akses lahan di Kelurahan Pa'Baeng-Baeng begitu sangat sempit yang dikarnakan antara jumlah penduduk dan pemukiman serta aktifitas masyarakat yang tidak memungkinkan banyaknya lahan kosong untuk mengimplementasikan Longgar secara merata .

d. Karakteristik Kependudukan

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Sebaran penduduk merupakan salah satu indicator yang dapat menunjukan kemajuan suatu wilayah. Sebaran penduduk hamper merata diseluruh RW dan RT. Jumlah penduduk Kelurahan Pa'baeng-baeng hingga akhir 2015 terdiri dari jumlah penduduk laki-laki : 6.758 jiwa dan perempuan adalah 7.273 jiwa, dengan KK sebanyak 3.247 Kepala Keluarga (KK).⁵¹

⁵⁰ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

⁵¹ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

Tabel. 2.1
Jumlah Penduduk

No.	Alamat RT/RW	Jumlah Kepala Rumah tangga	Jumlah kepala Keluarga	Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR	Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan
1	RT001-RW004	268	274	0	268	549	688
2	RT001-RW006	35	37	10	25	94	81
3	RT001-RW001	54	57	10	44	129	124
4	RT001-RW002	37	49	6	31	67	114
5	RT001-RW003	50	57	22	28	153	166
6	RT001-RW005	47	47	8	39	94	141
7	RT001-RW007	67	74	20	47	168	195
8	RT001-RW008	57	116	33	24	253	256
9	RT001-RW009	31	50	9	22	117	122
10	RT001-RW010	35	53	11	24	95	126
11	RT002-RW001	60	60	45	15	105	113
12	RT002-RW002	42	49	26	16	103	165
13	RT002-RW003	80	82	40	40	184	185
14	RT002-RW005	47	47	8	39	94	141
15	RT002-RW006	71	73	43	28	143	159
16	RT002-RW007	64	92	15	49	177	195
17	RT002-RW008	101	128	--22	79	288	258
18	RT002-RW009	48	73	23	25	139	166
19	RT002-RW010	89	149	43	46	301	299
20	RT003-RW001	61	61	14	47	92	108
21	RT003-RW002	35	55	22	13	115	106
22	RT003-RW003	61	61	11	50	130	132
23	RT003-RW005	55	59	16	39	109	98
24	RT003-RW006	35	49	5	30	101	104
25	RT003-RW007	60	122	27	33	257	239
26	RT003-RW008	48	53	0	48	122	142

27	RT003-RW009	26	28	0	26	37	41
28	RT003-RW010	77	85	11	66	162	158
29	RT004-RW001	67	83	56	11	183	183
30	RT004-RW002	36	53	21	15	104	145
31	RT004-RW005	48	48	34	14	92	108
32	RT004-RW007	39	95	19	20	194	195
33	RT004-RW008	64	108	0	64	211	236
34	RT004-RW010	53	93	7	46	241	223
35	RT005-RW005	78	120	61	17	281	268
36	RT005-RW007	35	63	18	17	124	131
37	RT005-RW008	113	187	17	96	375	399
38	RT005-RW010	61	167	4	57	338	329
39	RT006-RW08	56	90	24	32	237	224
	Rerata	2391	3247	761	1630	6758	7273

Sumber: Dokumen Kantor Lurah 2016 di akses pada tanggal 22 mei 2017 pukul 14.20

2. Struktur Penduduk Kelurahan Pa'baeng-baeng.

- Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Data kependudukan berdasarkan profil Kelurahan Pa'baeng-baeng kalau dilihat dari kelompok umur yang ada dapat dilihat bahwa kelompok terbesar pada usia produktif antara 20-29 tahun dan usia sekolah antara 5-19 tahun.⁵²

- Struktur Penduduk Menurut Mata Pencarian

Kegiatan penduduk di Kelurahan Pa'baeng-baeng didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa.⁵³ Hal ini menggambarkan bahwa Kelurahan Pa'Baeng-Baeng merupakan Kelurahan yang

⁵² Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

⁵³ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

dimana masyarakatnya sibuk. Sehingga bisa jadi menjadi salah satu kurangnya perhatian terhadap kebijakan Walikota Makassar tentang Longgar.

- Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pa'baeng-baeng sebagian besar penduduknya tidak pernah mengenyam pendidikan yaitu SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA dan Sarjana.

3. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Sistem Kemasyarakatan

- Sistem Gotong Royong Dan Kebersamaan

Kegiatan gotong royong masyarakat di Kelurahan Pa'baeng-baeng dapat dikatakan menonjol, terutama dalam pembangunan sarana peribadatan dan kegiatan sosial lainnya.⁵⁴ Namun dari hasil analisis penulis beranggapan bahwa ke-gotongroyonan masyarakat semakin memudar saat ini. Mungkin pengaruh modernisasi berupa teknologi yang mencekam dibenak masyarakat sehingga interaksi untuk saling mengingatkan memudar.

- Tata Budaya Dan Sistem Upacara Masyarakat

Kegiatan budaya dan upacara kemasyarakatan yang menonjol di kelurahan Pa'baeng-baeng, biasanya pada saat melangsungkan perkawinan. Salah satu kegiatan dalam perkawinan tersebut salah satunya terdapat kegiatan akad dan pesta.⁵⁵

⁵⁴ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016. Di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20.

⁵⁵ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

- Kesenian Rakyat.

Kesenian masyarakat yang masih dikembangkan, khususnya di Kelurahan Pa'baeng-baeng adalah kegiatan-kegiatan kesenian tersebut biasanya dilaksanakan pada even-even tertentu, seperti perkawinan, hari-hari besar nasional lainnya.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Sektor jasa dan perdagangan merupakan sector yang menjadi andalan penduduk kelurahan Pa'baeng-baeng. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.2

Mata Pencapaian Penduduk Kelurahan Pa'baeng-baeng 2016

Alamat RT/RW	Mata Pencapaian Penduduk						
	Pertanian, perkebunan, peternakan (Unit Rumah Tangga)	Perikanan/nela yan (unit Rumah Tangga)	Pertambangan /galian (Unit Rumah Tangga)	Industri/pabtrik (Unit rumah tangga)	Konstruksi/ba ngunan (Unit Rumah Tangga)	Perdaganga n/jasa (guru,tenag a kesehatan,h otel,dll)	Pegawai pemerintah (Unit Rumah Tangga)
RT001-RW004	0	0	0	0	0	0	268
RT001-RW006	0	0	0	0	0	16	19
RT001-RW001	0	0	0	0	0	50	4
RT001-RW002	0	0	0	0	1	33	3
RT001-RW003	0	0	0	0	8	42	0
RT001-RW005	0	0	0	1	1	36	9
RT001-RW007	0	0	0	0	1	48	18
RT001-RW008	0	0	0	0	4	49	4
RT001-RW009	0	0	0	0	0	27	4
RT001-RW0010	0	0	0	0	3	16	16
RT002-RW001	0	0	0	0	4	56	0
RT002-RW002	0	0	0	0	0	34	8
RT002-RW003	0	0	0	0	22	58	0

RT002-RW005	0	0	0	1	1	36	9
RT002-RW006	0	0	0	3	18	43	7
RT002-RW007	0	0	0	0	0	45	19
RT002-RW008	0	0	0	0	0	78	23
RT002-RW009	0	0	0	4	4	38	2
RT002-RW0010	0	1	0	14	9	58	7
RT003-RW001	0	0	0	0	4	53	4
RT003-RW002	0	0	0	0	0	24	11
RT003-RW003	0	0	0	0	5	56	0
RT003-RW005	0	0	0	0	1	47	7
RT003-RW006	0	0	0	0	1	8	26
RT003-RW007	0	0	0	0	12	35	13
RT003-RW008	0	0	0	0	2	29	17
RT003-RW009	0	0	0	0	0	23	3
RT003-RW010	0	0	0	0	1	59	17
RT004-RW001	1	0	0	40	0	26	0
RT004-RW002	0	0	0	0	0	34	2
RT004-RW005	0	0	0	0	3	38	7
RT004-RW007	0	0	0	0	7	23	9
RT004-RW008	0	0	0	0	0	34	30
RT004-RW010	0	0	0	0	0	42	11
RT005-RW005	0	0	0	0	0	72	6
RT005-RW007	0	0	0	0	0	31	4
RT005-RW008	0	0	0	0	3	79	31
RT005-RW010	0	0	0	0	0	56	5
RT006-RW008	0	0	0	0	0	48	8
RERATA	1	1	0	63	115	1580	631

Sumber: Dokumen Kantor Lurah 2016 di akses pada tanggal 22 mei 2017 pukul 14.20

5. Perkembangan Fasilitas

a. Fasilitas Perumahan

Pola permukiman-permukiman penduduk umumnya berupa permukiman tersebar. Kondisi ini disebabkan oleh pola jaringan jalan serta fasilitas umum seperti bangunan-bangunan masyarakat, puskesmas, pemerintahan kelurahan

tersebar secara merata. Intervensi perbaikan sarana permukiman belum maksimal, karena minimnya dana perbaikan serta banyaknya sarana permukiman yang harus terbenahi dalam jangka pendek (urgent), intervensi program P2KKP selama ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti perbaikan jalan lingkungan, MCK dan saluran air limbah (SPAL) dan Rehab Rumah Kumuh.⁵⁶

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan secara merata umum sudah tersebar secara merata diwilayah pendidikan dasar terdapat satu unit, sedangkan pendidikan menengah dan lanjutan berada sekitar pusat pemerintah Kota Makassar.

Tabel.2.3

Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kelurahan Pa'baeng-baeng 2016

Alamat RT/RT	Fasilitas Pelayanan Pendidikan				
	Dalam Kelurahan/kecamatan yang sama (Unit Rumah Tangga)	Luar Kecamatan (Unit Rumah Tangga)	Di kota lain (Unit Rumah Tangga)	Tidak Sekolah (Unit Rumah Tangga)	Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (Unit Rumah Tangga)
RT001-RW004	104	94	0	0	70
RT001-RW006	10	9	0	0	16
RT001-RW001	17	19	0	0	18
RT001-RW002	22	15	0	0	0
RT001-RW003	12	8	0	0	30
RT001-RW005	23	15	0	0	9
RT001-RW007	31	11	0	0	25
RT001-RW008	44	9	0	0	4
RT001-RW009	13	11	0	0	7
RT001-RW010	20	12	0	0	3

⁵⁶ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016. Di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20.

RT002-RW001	14	24	0	0	22
RT002-RW002	42	0	0	0	0
RT002-RW003	36	17	0	0	27
RT002-RW005	23	15	0	0	9
RT002-RW006	21	23	0	0	27
RT002-RW007	37	11	0	0	16
RT002-RW008	32	38	0	0	31
RT002-RW009	30	8	0	0	10
RT002-RW010	59	16	0	0	14
RT003-RW001	15	21	0	1	24
RT003-RW002	35	0	0	0	0
RT003-RW003	38	0	0	0	23
RT003-RW005	22	16	0	0	17
RT003-RW006	6	13	1	0	15
RT003-RW007	27	2	0	0	31
RT003-RW008	13	19	0	0	16
RT003-RW009	4	8	0	0	14
RT003-RW010	47	12	0	0	18
RT004-RW001	15	29	0	0	23
RT004-RW002	23	6	0	0	7
RT004-RW005	35	4	3	0	6
RT004-RW007	15	5	0	0	19
RT004-RW008	17	26	0	0	21
RT004-RW010	22	10	0	0	21
RT005-RW005	55	9	0	0	14
RT005-RW007	10	8	3	0	14
RT005-RW008	43	31	0	0	339
RT005-RW010	35	13	0	0	13
RT006-RW008	26	15	0	0	15
RATA RATA	1093	602	7	1	688

Sumber: Dokumen Kantor Lurah 2016 di akses pada tanggal 22 mei 2017pukul14.20

c. Fasilitas Kesehatan

Untuk menunjang kesehatan masyarakat terdapat satu fasilitas kesehatan berupa. Pelayanan kesehatan yang lebih lengkap kepada masyarakat umum lainnya belum terdapat di Kelurahan Pa'baeng-baeng

Tabel.2.4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alamat RT/RW	Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Rumah Sakit (Unit Rumah Tangga)	Praktik dokter/poliklinik (Unit Rumah Tangga)	Puskesmas/pustu (Unit Rumah Tangga)	Dukun/Pengobatan Traditional (unit Rumah Tangga)	Bidan/Mantri (Unit Rumah Tangga)	Tidak Permah (Unit Rumah Tangga)
RT001-RW004	268	0	0	0	0	0
RT001-RW006	14	8	13	0	0	0
RT001-RW001	2	4	48	0	0	0
RT001-RW002	30	1	6	0	0	0
RT001-RW003	0	3	47	0	0	0
RT001-RW005	15	3	29	0	0	0
RT001-RW007	39	0	28	0	0	0
RT001-RW008	10	9	38	0	0	0
RT001-RW009	11	3	17	0	0	0
RT001-RW010	0	15	20	0	0	0
RT002-RW001	4	5	51	0	0	0
RT002-RW002	0	17	25	0	0	0
RT002-RW003	5	0	75	0	0	0
RT002-RW005	15	3	29	0	0	0
RT002-RW006	11	8	52	0	0	0
RT002-RW007	20	6	35	0	3	0
RT002-RW008	19	25	57	0	0	0
RT002-RW009	8	3	37	0	0	0
RT002-RW010	11	2	76	0	0	0
RT003-RW001	1	5	55	0	0	0
RT003-RW002	0	18	17	0	0	0

RT003-RW003	1	3	57	0	0	0
RT003-RW005	20	8	27	0	0	0
RT003-RW006	0	16	18	0	1	0
RT003-RW007	17	2	41	0	0	0
RT003-RW008	28	19	1	0	0	0
RT003-RW009	9	6	11	0	0	0
RT003-RW010	19	3	55	0	0	0
RT004-RW001	1	4	62	0	0	0
RT004-RW002	0	14	22	0	0	0
RT004-RW005	6	1	41	0	0	0
RT004-RW007	7	5	27	0	0	0
RT004-RW008	30	18	16	0	0	0
RT004-RW010	14	15	22	0	0	0
RT005-RW005	8	0	66	0	0	4
RT005-RW007	8	4	23	0	0	0
RT005-RW008	50	35	28	0	0	0
RT005-RW010	5	1	50	0	5	0
RT006-RW008	14	8	34	0	0	0
RATA RATA	720	300	1356	0	11	4

Sumber: Dokumen Kantor Lurah 2016 di akses pada tanggal 22 mei 2017 pukul 14.20

d. Ruang Terbuka Hijau Dan Makam

RTH/Makam yang terdapat di Kelurahan Pa'baeng-baeng, yaitu tempat pemakaman umum.⁵⁷ Bisa dilihat dari dokumen kelurahan bahwasanya Ruang Terbuka Hijau pada Kelurahan Pa'baeng-baeng sangat minim, begitu sempitnya cuma ada ruang untuk pemakaman saja.

e. Utilitas/Layanan

- Jaringan Listrik

Masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng belum sepenuhnya memanfaatkan listrik yang berasal dari PLN, dalam artian belum seluruh RW dan RT yang ada

⁵⁷ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016. Di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20.

diwilayah kelurahan Pa'baeng-baeng sudah terlayani dengan jaringan listrik yang ada.

- Jaringan Air Bersih

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng sebagian besar masyarakat memanfaatkan jaringan air bersih dari PDAM dan air sumur .

- Jaringan Drainase Dan Irigasi

Jaringan drainase pada umumnya belum memadai, baik yang berada disepanjang jalan utama maupun yang berada di jalur pemukiman. Pada musim penghujan air yang melewati jaringan drainase yang ada tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurai genangan air. Aliran air jaringan drainase ini menuju kepermukaan tanah terendah.⁵⁸

- Jalur Transportasi

Berdasarkan kondisi jaringan jalan utama, sebagian besar jaringan jalan merupakan jalan hot mix. Kondisi jaringan jalan akan sangat mempengaruhi pola pergerakan masyarakat. Pola pergerakan kendaraan di Kelurahan Pa'baeng-baeng memiliki pola 2 arah, baik itu pada jaringan jalan utama maupun pada jalan lingkungan/dusun. Model angkutan atau jenis angkutan kendaraan terdiri dari kendaraan roda 4 dan roda 2. Jenis angkutan yang ada berupa angkutan truk barang atau pick up cidomo dan bentor. Kondisi ini sama dengan Kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Tamalate.⁵⁹

⁵⁸ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016. Di akses pada tanggal 22 mei 2017, pukul 14.20.

⁵⁹ Dokumen Profil Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar 2016.

B. Kebijakan Lorong Garden (Longgar)

1. Lahirnya Kebijakan

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan pun tak luput dari berbagai masalah, mulai dari kemiskinan karena kurangnya keterampilan, kebersihan karena kurangnya kesadaran, kriminalitas karena banyaknya pergaulan bebas serta masih banyak lagi masalah lain yang mengerogoti masyarakat kota . Oleh karena itu, melalui berbagai masalah yang timbul di Kota Makassar maka Walikota Makassar periode tahun 2014-2019 Bapak Ir.Ramdhan Pomanto dan wakilnya DR. Syamsul Rizal,MSi resmi dilantik pada tanggal 9 Mei 2014 di pelataran pantai Losari menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan atau program-program, yang dimana untuk mengatasi kemiskinan muncullah kebijakan “Beras Raskin” dan jaminan sosial lainnya, Untuk mengatasi masalah kebersihan, keasrian, keamanan serta meminimalisir tindak kriminalitas muncullah yang namanya MTR “Makassar Tidak Rantasa”, Lisa “Lihat Sampah Ambil” serta Longgar “Lorong Garden” serta Sombere and Smart City Makassar yang dimana masing-masing istilah tersebut bermakna untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, keamanan dan keterampilan melalui kerja sama pemerintah melalui fasilitas yang diberikan.

Dalam menciptakan kota bersih, aman, dan nyaman, saat ini Walikota Makassar telah memperkenalkan istilah Lihat Sampah Ambil (LISA), Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR), Lorong Garden (LONGGAR) dan Sombere and Smart City Makassar yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih.

Sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung Makassar Tidak Rantasa' adalah membuat program Lorong Garden yang merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih, terampil dan aman melalui Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.⁶⁰

Menurut peneliti, tujuan dari Lorong Garden ini adalah sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya akan lingkungan sehat, terampil, rapih, bersih dan yang paling penting memperbaiki psikologis masyarakat akan dampak pergaulan yang semakin tidak terarah dengan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis ini.

Dalam hal ini dikemukakan Ibu Hj. Sundari Sulaiman Selaku Kabid Pertanian atau Padi Palawijaya & Holtikultura pada tanggal 6 Agustus 2017:

*"Lahirnya Lorong Garden merupakan Kebijakan Walikota Makassar sesuai Visinya menciptakan kota dunia melalui tata lorong. Tujuan daripada lorong garden ini ialah untuk menciptakan lorong produktif melalui penanaman cabe dan sayuran lainnya sehingga dapat mengendalikan atau menekan inflasi cabe dimasyarakat"*⁶¹

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan lorong produktif dan memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong yang biasanya kumuh dan sering menjadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, indah, bahkan ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi

⁶⁰ Novri Ardi Wiranata Nur. *Analisis Pelaksanaan Program Makassar Ta' Tidak Rantasak Di Kota Makassar, Skripsi* (Makassar:Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Hasanuddin,2015),h.33

⁶¹ Wawancara: Ibu Sundari Sulaiman Selaku Kabid Pertanian pada tanggal 06 Agustus 2017 pada pukul 11.00 Wita.

masyarakat. Namun secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika warga mendengar program ini, mereka sangat antusias ingin melaksanakan bagian daripada program Bapak Walikota Makassar untuk mewujudkan Lorong-lorong yang bersih, asri dan nyaman melalui kegiatan LONGGAR (Lorong Garden), sisa bagaimana pemerintah mensosialisasikan dan menginformasikan secara merata tentang program ini agar implementasi kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden dapat berjalan dengan baik.

2. Fenomena Sosial Masyarakat Kota

Kota Makassar sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia timur memberikan gambaran kehidupan yang menjanjikan bagi sebagian orang. Peningkatan arus urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, bahkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Fenomena ini semakin menambah keragaman kota Makassar dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya, namun disisi lain juga tidak menutup kemungkinan semakin bertambahnya masalah disegala bidang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masalah yang kerap kali paling nampak ialah masalah kemiskinan, kebersihan, keamanan yang dimana begal merajalela dan masih banyak masalah lainnya yang senantiasa membayang-bayangi masyarakat kota Makassar. Nah, dari masalah yang senantiasa mengintai masyarakat Kota Makassar, memaksa pemerintah kota untuk senantiasa mengeluarkan ide-ide cemerlang dalam hal menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Kota Makassar melalui kebijakan, keputusan yang diambil. Dalam hal ini, Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah yang tugasnya tidak lain

adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum.⁶²

Seperti yang dikemukakan oleh informan di pemerintahan Kantor Balaikota tepatnya Dinas Ketahanan Pangan yaitu Ibu Rahmaniar Syamsul SP. MS.i Selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan pada tanggal 12 Februari 2017.

“Tujuan dibuatnya Longgar ini adalah berangkat dari Visi Walikota Makassar untuk mensejahterakan masyarakat melalui tata kelola lorong kota yang dimana untuk menjawab fenomena sosial yang ada , lebih banyak masalah yang timbul dipemukiman lorong. Diharapkan dengan adanya Program longgar dapat menjadi sebuah alternatif untuk meminimalisir penyakit sosial yang ada.”⁶³

Tentu persoalan ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Fenomena sosial yang sering menjadi masalah dalam lingkungan perkotaan salah satunya adalah masalah kebersihan, kemiskinan, keamanan dalam hal ini kenakalan remaja, begal dan sebagainya . Dengan demikian , faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masalah sosial yang ada adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis dan penting harus kita ketahui bahwasanya kebanyakan permasalahan tersebut berasal dari lingkungan yang tidak sehat dalam hal ini lorong-lorong di perkotaan .

Demikian pula dengan fenomena sosial masyarakat lorong di sebagian Kelurahan Pa’baeng-baeng, walaupun secara rata-rata pekerjaan atau kesibukan masyarakat kebanyakan pada bidang perdagangan dan jasa, namun di beberapa objek penelitian yang diteliti penulis, tidak lepas dari kondisi dan perilaku sosial

⁶² Dr. Solihin Abdul Wahab, M.A. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 2, 2005), h.47.

⁶³ Wawancara : Ibu Rahmaniar Syamsul SP. MS.i Selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan pada tanggal 12 februari 2017.

masyarakat yang masih bisa dikatakan lemah disektor pendidikan yang dimana mempengaruhi kondisi masyarakat sekitar menjadi pengangguran, penjudi, peminum, dan pemulung. Sehingga dari perilaku masyarakat seperti itu secara otomatis mempengaruhi sikap masyarakat menjadi apatis terhadap kebijakan atau program pemerintah yang ada, mulai dari ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan sehingga membuat lingkungan dalam hal ini lorong menjadi gelap, kumuh, kotor, coretan dimana-mana dan berandalan yang sedang nongkrong diujung lorong.

Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Hamid S.Sos selaku mantan ketua RT 001 RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate ialah:

*“ Sebenarnya program ini sangat bagus, Cuma tingkat pendidikan yang mempengaruhi perilaku pemahaman masyarakat untuk ikut andil dalam program itu , apalagi jika program ini istilahnya asing seperti Lorong Garden”.*⁶⁴

Dalam hal ini, ke-efektifan sebuah kebijakan, keputusan maupun program pemerintah itu perlu adanya dukungan publik itu sendiri, disamping pemerintah perlu cermat menempatkan sesuatu pada tempatnya semisal pada program lorong garden ini yang memiliki istilah asing , artinya pemerintah atau instansi yang terkait dalam program ini perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu mempengaruhi perilaku pemahaman masyarakat itu sendiri sehingga pelaksanaan Lorong Garden ini dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat sekitar.

⁶⁴ Wawancara: H.Hamid S.Sos. Selaku masyarakat mantan ketua RT 001 di RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate. Pada tanggal 10 Maret 2017.

3. Implementasi Kebijakan Lorong Garden Di Kelurahan Pa'baeng-baeng.

Lorong garden, salah satu bagian dari Program Andalan Walikota Makassar Danny Pomanto yakni “Makassar Tidak Rantasa” (MTR). Program Lorong garden dan Lihat Sampah Ambil (LISA) adalah bagian program MTR yang digaungkan disetiap kelurahan dan kecamatan di kota Makassar.⁶⁵

Hadirnya program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yakni Lorong Garden (Longgar), diapresiasi dan dinilai membuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Guna mendukung, mengembangkan dan menyukseskan program Longgar ini, ada 2 instansi yang berkaitan langsung. Kedua instansi tersebut yakni Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar dan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar sebagai instansi teknis yang membuat perencanaan pengembangan kebun lorong hijau produktif atau yang dikenal dengan lorong garden (longgar) mengalokasikan senilai Rp123 juta. Dengan demikian, anggaran perencanaan longgar sebesar Rp2,9 juta per lorong. Alokasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 Kota Makassar. Pengembangan Longgar dilakukan pada 42 lorong tersebar pada 14 kecamatan di Makassar. Sehingga, masing-masing kecamatan memiliki tiga lorong sebagai percontohan longgar. Untuk longgar percontohan ini, pihak kecamatan-lah yang menentukan lorong mana saja yang akan dikembangkan.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Gafur. *Memfaatkan Pekarangan Mendukung Program Lorong Garden (Longgar)*, Dalam Materi Pelatihan.(Makassar: Kantor Katahanan pangan,2015),Diakses melalui Website.fkthltbppsulsel.wordpress.com.

⁶⁶ Abdul Gafur. *Memfaatkan Pekarangan Mendukung Program Lorong Garden (Longgar)*, Dalam Materi Pelatihan.(Makassar: Kantor Katahanan pangan,2015),Diakses melalui Website.fkthltbppsulsel.wordpress.com

Dalam hal ini juga Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar dalam menyukseskan program Longgar menurunkan / menerjunkan sebanyak lebih 51 orang tenaga Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Bantu/Kontrak (THL-TBPP). Keberadaan petugas lapangan ini untuk memberikan pendampingan atau pembinaan pada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan Longgar di 143 kelurahan yang ada di Kota Makassar.

Hubungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dalam program Loroang Garden dapat dilihat dari tujuan Longgar itu sendiri untuk menciptakan lorong produktif. Seperti yang dikemukakan oleh Kabid Pertanian yaitu Ibu Sundari Sulaiman bahwasanya:

“Longgar itukan kebijakan Walikota yang dimana membuat program sesuai visi misinya merestorasi nasib rakyat melalui tata lorong kota dengan menciptakan lorong produktif, artinya lorong produktif itu lorong yang bersifat ada manfaatnya. Ditambah lagi walikota melihat adanya inflasi cabe sehingga kita sebagai dinas yang berhubungan langsung seperti Dinas pertanian dan Dinas ketahanan pangan bertanggungjawab sepenuhnya dengan pembagian tugas masing-masing. Tugas dari dinas pertanian ialah bagaimana membangunkan tugu bahwasanya ada program longgar yang dibangun didaerah tersebut sembari melakukan pembinaan kepada masyarakat bercocok tanam yang baik.”⁶⁷

Dilain sisi Ibu Rahmaniar Syamsul Selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan di Kantor Kahanan Pangan yaitu:

“Longgar adalah bagian daripada tanggungjawab kami karena berhubungan dengan salah satu tujuan kami yaitu mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan pangan segar. Disini kami melakukan pendekatan pangan dan gizi rumah tangga bagaimana setelah produksi masuk dikelola untuk dimakan. Pendekatan gisi dan pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara: Ibu Sundari Sulaiman Selaku Kabid Pertanian pada tanggal 06 Agustus 2017 pada pukul 11.00 Wita.

⁶⁸ Wawancara : Ibu Rahmaniar Selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi pangan di Dinas Ketanan Pangan pada tanggal 12 february 2017.

Namun seperti yang dikemukakan Bapak Arief S.H selaku Kepala Lurah Pa’Baeng-Baeng, melalui wawancara pada tanggal 27 Desember 2016, bahwasanya,

*“Kami dari pihak kelurahan sangat mengapresiasi program Bapak Walikota ini karena sifatnya mengarahkan kepada masyarakat itu sendiri bagaimana menciptakan, merawat lorong menjadi indah. Namun dari berbagai kerjasama pemerintah dan instansi, perlu adanya observasi kecocokan akses, lahan, tanah dan karakter masyarakat karena program ini tidak bisa asal pasang karena di Kelurahan Pa’baeng-baeng ini sangat padat lorongnya ”.*⁶⁹

Kebijakan Longgar ini seperti yang dikemukakan informan diatas bahwasanya tidak bisa asal memasang, harus membutuhkan kajian lebih dalam dalam mengelola akses ruang yang sempit, mencocokkan karakter masyarakat untuk senantiasa bisa bekerjasama dengan pemerintah serta dalam pelaksanaannya tidak adanya ketergantungan antara pemerintah dan instansi terkait sebagai kerjasamanya.

Menurut Hogwood dan Gunn bahwa Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal, atau walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan/instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam jumlah maupun kadar kepentingan.⁷⁰ Karena tidak bisa dipungkiri dapat terjadi filterisasi anggaran dan sebagainya jika pelaksanaan kebijakan saling ketergantungan dan libat-melibatkan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam

⁶⁹ Wawancara: Arief S.H, selaku Kepala Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pada tanggal 27 Desember 2016. Pukul 10.40 Wita.

⁷⁰ Dr. Solihin Abdul Wahab, M.A. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 2, 2005), h.75.

implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.⁷¹

Menurut Pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁷² Dalam pembahasan atau point ini penulis akan kaitkan dengan pandangan Edwards III bagaimana pola komunikasi dan sumber daya yang ada di Kelurahan Pa'baeng-baeng, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum, banyak ilmuwan sepakat bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan dalam bentuk ide, gagasan, pikiran, perasaan, emosi, perilaku dan sebagainya. Dalam proses komunikasi, paling sedikit terdapat tiga unsur pokok, yaitu penyebar pesan, pesan dan penerima pesan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif/berhasil bila diantara penyebar dan penerima pesan terdapat suatu pengertian yang sama mengenai ini pesan.⁷³

Aparat kelurahan sebagai layanan terdepan kepada masyarakat pada pemerintah kota, perlu menguasai program yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Pengetahuan tentang program itu sendiri dan kemampuan mengajak

⁷¹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h.87.

⁷² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),h.90

⁷³ Dr.Mahi M.Hikmat, M.Si. *Komunikasi Politik, Teori dan Praktik*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011),h.6-7

warganya untuk menjalankan program tersebut sangat penting dikuasai oleh aparat kelurahan.⁷⁴

Keberhasilan implementasi kebijakan publik mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.⁷⁵

Program mengenai Lorong Garden yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga melalui pihak kelurahan. Disisi lain dari pemahaman aparat kelurahan tentang program tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program Lorong Garden tersebut. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar, langsung disampaikan ke seluruh SKPD yang ada di kota Makassar untuk dijalankan, namun penyampaian program ini tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program, yang diterima oleh SKPD khususnya kelurahan hanyalah garis besar mengenai program tersebut.⁷⁶ Jumlah aparat kelurahan juga memegang peranan penting dalam menjalankan program ini dengan kerjasama intansi terkait dalam mensukseskan program lorong garden ini sehingga Implementasi kebijakan Lorong Garden di Kelurahan Pa'baeng-baeng akan

⁷⁴ Yamlikh Azikin, Dkk. *Komunikasi Partisipatif Aparat Kelurahan Dalam Mendukung Makassar Kota Dunia Melalui Program Kebersihan Lingkungan "Makassarta' Tidak Rantasa"*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial & Ilmu Politik*.(Vol-4, No.4, Tahun 2015),h.485.

⁷⁵ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.90.

⁷⁶ ⁷⁶ Yamlikh Azikin, Dkk. *Komunikasi Partisipatif Aparat Kelurahan Dalam Mendukung Makassar Kota Dunia Melalui Program Kebersihan Lingkungan "Makassarta' Tidak Rantasa"*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial & Ilmu Politik*.(Vol-4, No.4, Tahun 2015),h.485.

berjalan dengan baik jika salah satu variabel keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi antara pemerintah dan kelompok sasaran itu tepat dan merata. Seperti yang dikemukakan Bapak Abdul Rahim sebagai Sekertaris Kelurahan Pa'baeng-baeng pada tanggal 27 Desember 2016 yaitu;

“ Program Lorong Garden ini kami sebenarnya sudah komunikasikan bersama beberapa staff SKPD sejajaran dan beberapa tokoh masyarakat tentang program pemerintah ini, Cuma memang pendistribusian informasi secara langsung ke lorong-lorong masih belum merata khususnya di kelurahan pa'baeng-baeng.”⁷⁷

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah itu dilihat bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat itu jelas dan dimengerti masyarakat. Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi , koordinasi dan transparansi anggaran yang sempurna diantara berbagai unsur dan badan yang terlibat dalam program.

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit bisa diwujudkan. Walaupun sistem informasi manajemen mungkin dapat membantu dalam memadukan arus informasi yang diperlukan, informasi ini belum bisa menjamin bahwa data, saran dan perintah-perintah yang dihasilkan benar-benar dimengerti sebagai apa yang dikehendaki oleh pihak yang mengirimnya.⁷⁸

Sebagaimana hal senada yang diungkapkan Bapak Arief S.H Selaku Kepala Kelurahan Pa'baeng-baeng pada Wawancara tanggal 27 desember 2016.

“ Sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada seluruh RT/RW yang ada dikeluarahan Pa'baeng-baeng ini sebagai perpanjangan tangan kami

⁷⁷ Wawancara : Abdul Rahim , Selaku Sekertaris Lurah , Pada Tgl 27 Desember 2016

⁷⁸ Dr. Solichin Abdul Wahab, M.A. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.(Jakarta: Bumi Aksara,2005), h.77.

*tentang program Lorong Garden, sisa bagaimana tugas RT/RW memberikan arahan kepada masyarakat sekitar bagaimana menjelaskan program walikota ini, Namun memang kami tidak semena-mena memasang Lorong Garden disetiap lorong karena perlu uji kecocokan lahan, bibit dan sebagainya untuk program ini”.*⁷⁹

Pernyataan diatas menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebenarnya masih sangat kurang maksimal , karena proses penyampain informasi melalui sosialisasi staf kelurahan terjun langsung kepada masyarakat lorong itu jarang, hanya melalui RT/RW yang dimana sebenarnya program ini perlu penyuluhan pengertian yang akurat dari instansi terkait yaitu melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar sebagai instansi teknis yang membuat perencanaan pengembangan kebun lorong hijau produktif atau yang dikenal dengan lorong garden kepada masyarakat itu sendiri. Disini seakan antara staf Lurah dan pihak DKP3 saling ketergantungan dalam program ini. Padahal Menurut Hogwood & Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka hubungan saling ketergantungan harus kecil.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.⁸⁰ Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni staff atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staff implementor khususnya dalam menangani Lorong Garden. Ketersediaan jumlah staff yang cukup menjadi faktor

⁷⁹ Wawancara: Arief S.H, selaku Kepala Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pada tanggal 27 Desember 2016. Pukul 10.40 Wita.

⁸⁰ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.91.

penentu suatu kebijakan. Begitupun kegagalan suatu implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan karena staff tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Seperti yang dikemukakan salah satu informan dipemerintahan Kantor Balaikota tepatnya Dinas Ketahanan Pangan yaitu Ibu Rahmaniari Syamsul SP. MS.i selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan pada tanggal 12 Februari 2017.

“Sebenarnya kami sudah lama mengadakan program ini, terutama disemua kecamatan ada binaan kami yang ditempatkan di 14 kecamatan, dan terkadang dalam satu kecamatan itu ada beberapa binaan kami yang pegang lebih dari 2 keluarahan sebagai perpanjangan tangan kami masalah lorong garden ini disamping juga dalam setiap kecamatan itu sebenarnya hanya ada 3 lorong yang dianggarkan untuk supaya dapat menjadi contoh pada lorong-lorong lainnya. Lorong Garden ini kami percayakan teknis penyuluhnya yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan yang memang khusus ahli dalam tanaman itu adalah DKP3 disamping kita mendampingi untuk terjun langsung di lorong. Namun memang khusus di Kelurahan Pa’baeng-baeng masih sangat kurang maksimal karena kendala personil untuk terjun langsung. Penyuluh kita sangat kurang karena sudah banyak yang pensiun. Untuk sekarang kita dari SKPD perpanjangan tangan Bapak Walikota Kota Makassar masih ingin menambah personil untuk menjalankan program ini secara maksimal.”⁸¹

Sumber daya yang dimiliki untuk penanganan Lorong garden ini sebenarnya belum terlalu maksimal dikarenakan personil yang bertanggung jawab untuk penyuluhan itu saling ketergantungan satu sama lain. Seharusnya Kelurahan sebagai penanggung jawab serta pelaksana dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang salah satu fungsinya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pa’baeng-baeng terkait Lorong Garden namun hasil penelitian penulis sangat berbeda yang didapatkan dilapangan dengan berbagai alasan, mulai dari personil

⁸¹ Wawancara: Ibu Rahmaniari Syamsul S.p, MS.i. selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan pada tanggal 12 Februari 2017 pada pukul 11.00 Wita.

yang kurang memadai serta anggaran yang penulis temukan mulai dari pejabat lurah yang mengatakan anggaran untuk Lorong Garden ini tidak ada tapi swadaya, dilain sisi Kantor Katahanan Pangan mengatakan ada anggaran untuk itu namun tidak seberapa dan tidak semua lorong yang di kerjakan, sehingga masyarakat bertanya-tanya yang mana sebetulnya benar.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.⁸²

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan sangat berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam buku Nugroho, karakter utama harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan ialah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran senantiasa mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁸³

Dalam Hal kebijakan Lorong Garden di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate disposisinya atau sikap implementor belum seutuhnya

⁸²AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010),h.92.

⁸³ Tedi Putra. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di Kepulauan Taka Bonerate*. Skripsi,(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016),h.43.

mendukung dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik karena masih sangat kurangnya pemahaman mereka sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini Lurah atas kebijakan Lorong Garden, adanya perbedaan perspektif dari segi pendanaan antara pemerintah lurah dengan instansi sebagai teknis dalam program ini, dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa program ini tidak mempunyai anggaran tapi swadaya dan ada yang mengatakan program ini ada anggaran yang sudah disediakan.

Jadi sangat jelas bahwa pemerintah serta instansi yang terlibat dalam program ini otomatis akan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena hal yang kecil seperti anggaranpun masih dianggap sesuatu yang membingungkan didalam tataran kelurahan dan sejaranya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar supaya dalam menjalankan kebijakan tidak ada yang melenceng dari tujuan dan sasaran pada kebijakan tersebut. Begitupun Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya membuat organisasi tidak fleksibel.⁸⁴

Dalam buku Budi Winarno, Peraturan daerah merupakan suatu produk hukum daerah yang bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam

⁸⁴AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2010) ,h.92.

wilayah teknis pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP, berbeda dengan kebijakan yang berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan standar operational agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁵

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar No.660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar. Dalam hal ini ada 2 instansi yang berkaitan langsung dalam struktur birokrasi dalam program Lorong Garden ini, Kedua instansi tersebut yakni Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar dan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar sebagai instansi teknis yang membuat perencanaan pengembangan kebun lorong hijau produktif atau yang dikenal dengan lorong garden (longgar) .

Maka dari analisis penulis bisa dikatakan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bapak Walikota tersebut, dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai penanggung jawab serta pelaksana dalam kebijakan Lorong Garden disamping itu dibantu oleh instansi terkait.
2. Sesuai jenis kebijakan/program yang dibuat pemerintah maka Instansi yang cocok atau terkait dan berhubungan langsung dalam Peraturan atau Surat Keputusan Walikota Makassar adalah Dinas ketahanan Pangan dan

⁸⁵ Tedi Putra. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di Kepulauan Taka Bonerate*. Skripsi,(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016),h.46.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh masyarakat Lorong di Kota Makassar.
- b. Sebagai tempat bertanya dan belajar masyarakat berkaitan masalah keefektifan pengelolaan bibit, lahan dilingkungan lorong.
- c. Sebagai penindak lanjutan pengaduan masyarakat dan mengkoordinasi dengan pihak terkait setiap permasalahan bibit, lahan dan perawatan tanaman pada setiap Lorong Garden.

Walaupun dalam Surat Keputusan Walikota Makassar No.660.2/1085/Kep/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta'Tidak Rantasa' Kota Makassar sudah memberikan gambaran struktur birokrasi yang jelas akan tetapi menurut analisa penulis di lapangan sungguh instansi yang terkait dalam program ini belum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam surat keputusan dan peraturan pemerintah daerah.

C. Persepsi Masyarakat Kelurahan Pa'Baeng-Baeng Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang "Lorong Garden"

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Walikota Makassar tersebut sangat bervariasi, yaitu mulai dari persepsi masyarakat bahwa lorong garden adalah program pemerintah yang memiliki banyak tanaman hias, persepsi masyarakat terhadap lorong garden adalah suatu kebijakan Walikota Makassar dengan memanfaatkan lahan lorong-lorong yang ada, persepsi masyarakat terhadap Lorong garden adalah memperindah lorong, mempercantik lorong, serta masih banyak masyarakat lorong terkhusus masyarakat awam yang masih kurang paham

dengan istilah Lorong Garden karena mungkin dari segi bahasa dan sebagainya. Berbagai persepsi serta pemahaman masyarakat diperoleh dari beberapa faktor dibawah ini, sebagai berikut:

1. Kurang Sosialisasi

Dalam buku Soejono Soekanto yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar yaitu Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik dan memperkenalkan pihak atau objek yang diajak , agar pihak atau objek tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata-mata agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan akhir adalah agar manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan dapat menghargainya.⁸⁶

Sosialisasi dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah kemasyarakatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab, darisana masyarakat dapat mengambil atau memetik pemahaman atas sebuah produk kebijakan pemerintah yang ada. Perumusan kebijakan tanpa adanya sosialisasi, adalah sesuatu yang mustahil untuk mengharapkan keberhasilan suatu kebijakan.

Sosialisasi kepada masyarakat dari Kelurahan dan dinas kerjasama seperti DKP3 sepatutnya dilakukan agar masyarakat tahu bahwa adanya Lorong Garden dapat membuat masyarakat semakin antusias untuk ikut serta dalam pelaksanaannya, menjelaskan bagaimana dan untuk kebaikan siapa program ini dibuat. Terkait apabila sosialisasi cukup baik, maka otomatis komunikasipun

⁸⁶ Nurul Qolbi Wulansari Muslimin. *Implementasi Peraturan Desa No.1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat Di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Skripsi,(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2016),h.48-49.

berjalan dengan baik. Dengan adanya kejelasan sosialisasi serta komunikasi mengenai Lorong Garden ini sesuai tugas dan fungsi pemerintah dan DKP3 , maka masyarakat dapat senantiasa meminta petunjuk untuk kemajuan kebijakan Lorong Garden tersebut.

Dalam hal ini, Kelurahan mempunyai tugas untuk terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya kebijakan Lorong Garden tentang pembenahan lorong dan membangkitkan keterampilan masyarakat. Sedangkan tugas DKP3 memiliki tugas sebagai pelaksana atau eksekutor lapangan di setiap lorong. Sosialisasi, informasi dan komunikasi yang sudah jelas, dapat mempermudah kebijakan Lorong Garden berjalan dengan baik.

Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan atau kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Selain itu kebijakan yang disosialisasikan harus tepat, jelas dan konsisten agar masyarakatpun bisa melihat panutan baik kepada pemerintah itu sendiri sehingga apa yang diharapkan untuk kesuksesan kebijakan dapat berjalan dengan baik dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Akan tetapi dalam kebijakan walikota Makassar tentang Lorong Garden ini, sangat kurang sosialisasinya sehingga sebagian masyarakat tidak mengerti apa itu Lorong Garden . Seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang bernama Muhtar Daeng Ratte selaku warga RT 001 RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng:

“ Jujur saya masih kurang tau itu istilah Lorong Garden apa itu, yang biasa kudengar itu Cuma lorong KB ji ”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara : Muhtar Daeng` Ratte, selaku warga RT 001 RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate. Pada tanggal 6 juni 2017.

Dalam hal ini, ketidakpahaman warga dengan program Pemerintah itu terkait karena sangat kurangnya sosialisasi, informasi instansi terkait penanggung jawab program ini. Padahal salah satu indikator keberhasilan program pemerintah ialah bagaimana pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan dan lebih penting lagi agar supaya mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan, mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

2. Lorong Garden Tanpa Pemberdayaan

Kebijakan publik merupakan suatu prasarana bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini, masalah sosial yang ada disekitar masyarakat baik masalah pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, kebersihan dan masih banyak lagi.

Dengan adanya kebijakan publik, diharapkan dapat menjadi fasilitas yang sangat berperan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut sekaligus dapat memberdayakan publik. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik harus didekati sangat hati-hati, baik pada tahap pembuatan dan implementasinya, serta pada tahap implementasinya agar senantiasa melibatkan masyarakat untuk diberdayakan supaya masyarakat mampu membangun sendiri potensi, kemampuan dan kekuatan mereka dengan pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat sehingga apa yang diharapkan untuk keberhasilan sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Secara etimologis, pemberdayaan dalam bahasa inggris disebut dengan *empowerment*. Merujuk pada *Webster's New World Dictionary*. *Empowerment*

berasal dari kata kerja *empower*, berarti *giving power* atau *authority to giving ability to, or enable*. Jadi berdasarkan asal-usul katanya, secara umum, pemberdayaan adalah satu pihak memberikan kekuasaan atau wewenang, atau memberi kemampuan kepada pihak lain sehingga pihak lain tersebut menjadi berdaya.⁸⁸

Pada dasarnya, pemberdayaan adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengembangan, dan kemandirian agar dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi terhadap lingkungan demi keadaan yang lebih baik.⁸⁹ Namun ironinya, ada kecenderungan dimana kadangkala pada tahap tersebut seringkali tidak ditangani dengan baik bahkan kadang diabaikan, seperti dalam kebijakan pemerintah tentang Lorong Garden khususnya di Kelurahan Pa'baeng-baeng yang masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya baik dari segi sosialisasi, komunikasi, tumpang tindihnya kebijakan serta sikap implementor dan pemberdayaan kepada masyarakat sangat kurang. Seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak M. Idris K. Selaku Ketua RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng bahwa:

*“Kalau saya lihat Kebijakan program Lorong Garden ini kurang serius karena ada beberapa masalah yang saya lihat. yaitu, kurang anggaran, kurang sosialisasi baik antara lurah dan DKP3 sebagai eksekutor ke lorong, masyarakat seakan tidak dipercaya untuk mengerjakan, asal jadi jika dikerjakan, , pot plastik yang tidak bisa tahan lama dan pak lurah tidak pernah turun langsung ke lorong mempertanyakan keadaannya hanya kebanyakan dikantor. Keberhasilan implementasi Program ini tergantung bagaimana pemerintah dan masyarakat peduli sebab kalau tidak , itu sama halnya hambur uang ”.*⁹⁰

⁸⁸ Andy Al Fatih. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Unpad Press, 2010), h. 23.

⁸⁹ Andy Al Fatih. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. h. 23-24.

⁹⁰ Wawancara: M. Idris K, Ketua RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate pada tanggal 10 Maret 2017.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Pemerintah serta instansi terkait sebagai pelaksana program lorong garden masih sangat belum maksimal dikarenakan aparat pelaksana hanya memasang langsung tanpa adanya pemberdayaan pendidikan dasar ilmu pertanian berbasis lahan lorong kota dalam hal ini penyuluhan kepada masyarakat namun cuma memasang langsung tanaman seperti cabe, terong dan lain sebagainya lalu ditinggalkan dan terabaikan.

3. Apatis dan Skeptis

Dari kurangnya pemberdayaan seperti yang dikemukakan diatas, sehingga dapat mempengaruhi sikap masyarakat, dalam hal ini bisa membuat masyarakat untuk apatis dan skeptis dalam merespon kebijakan Lorong Garden tersebut. Banyaknya kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar ini yang memaksa masyarakat untuk ragu-ragu dan acuh tak acuh dalam melihat program ini lebih jauh.

Keberhasilan pemerintah dalam setiap kebijakan itu bergantung pada kepuasan masyarakat serta keikutsertaan, ketertarikan dan dukungan dari masyarakat setempat. Namun berbeda dengan yang dirasakan masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate bahwasanya dalam wawancara ibu Subaeda Dg. Beda mengemukakan.

“ Disini susah diterapkan itu karena cuek masyarakatnya. Itupi disini saja biasa kalau ada himbauan kerja bakti , adapi kupon raskinnya baru bergerak apalagi kalau tidak ada memangmi apa-apanya itu program (uangnya) pasti tidak ada mau bergerak. ”⁹¹

Hampir sama dengan yang dikemukakan ibu Rahmatia selaku warga Kelurahan Pa'baeng-baeng Bahwasanya,

⁹¹ Wawancara: Daeng Beda, Selaku Masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate. Pada Tanggal 27 Desember 2016 Pukul 10:00 Wita.

*Susah diterapkan disini program pemerintah kalau masalah pembenahan seperti lorong garden karena masyarakat disini susah diatur. Itupi bergerak kalau ada bantuan langsung.*⁹²

Sehubungan dengan pernyataan diatas, bahwa keberhasilan suatu program pemerintah terkhusus Lorong Garden dilihat bagaimana dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Namun perlu diketahui kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaiknya jika kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti harus merogok kocek masyarakat melalui swadaya pembelian bahan dan sebagainya akan kurang mendapat dukungan. Tergantung bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri.

Sebagai bahan perbandingan, penulis mengambil sampel dari salah satu ketua RT yang berada pada naungan RW lain yang sukses dalam menjalankan Program Lorong Garden yaitu, Ibu Hadrah selaku RT 002 RW 005:

*“ Keberhasilan pada pembenahan pada Lorong kami karena terletak pada ambisi antara tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang mempunyai semangat untuk program ini. Masyarakat kami tidak ketergantungan pada pemerintah yang ada tetapi kebanyakan swadaya walaupun sebenarnya ada anggaran tapi sangat sedikit. Dan salah satu keberhasilan kami adalah karena kami senantiasa mengadakan kompetisi pada pembenahan lorong agar masyarakat termotivasi akan program tersebut.”*⁹³

Dilihat dari pendapat Ibu Hadrah bahwasanya keberhasilan suatu kebijakan juga dilihat bagaimana peran tokoh masyarakat itu baik serta partisipasi masyarakat itu aktif berinisiatif mengadakan kompetisi kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri termotivasi yang secara tidak langsung bersamaan suksesnya suatu kebijakan atau program pemerintah.

⁹² Wawancara: Ibu Rahmatia Selaku Warga Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate. Pada Tanggal 30 Juni 2017, pukul 10:00 wita.

⁹³ Wawancara; Ibu Hadrah selaku ketua RT 002 RW 005 Pada Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate. Pada tanggal 27 Desember 2016 pada pukul 11:20 Wita.

4. Munculnya Badan Usaha Lorong (BULO) Sebagai Tumpang Tindihnya Kebijakan

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk senantiasa mensejahterakan rakyatnya , termasuk pembuatan program-program yang dapat mengatasi masalah kemasyarakatan yang ada pada lingkungan. Sebab, lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu , baik lingkungan fisik maupun sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar.⁹⁴

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu Negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.⁹⁵

Dalam hal pemberdayaan masyarakat Kota Makassar mulai dipermukikan gang sempit, lorong dan sebagainya melalui program Lorong Garden, Pemerintah juga merencanakan bakal mengimplementasikan melalui pembentukan Badan Usaha Lorong (BULO) dengan skema koperasi. Program yang digalakkan Pemerintah Kota Makassar ini terbilang unik dan sangat jarang disebuah daerah membuat program seperti ini. Melalui program Bulo, pemerintah mampu membangkitkan perekonomian kerakyatan di Indonesia, dimulai dari Kota Makassar. Yakni ada pada tanaman cabe atau Lombok yang bagi warga Makassar merupakan tanaman produktif yang bernilai ekonomi tinggi.

⁹⁴ Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, Dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. (Jakarta:Kencana,2010), h.162.

⁹⁵ Drs. AG. Subarsono, M,Si.,MA. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.14.

Program Badan Usaha Lorong (BULO), adalah program lembaga masyarakat yang banyak mengandung makna sosial dan ekonomi untuk bertujuan profit, semi profit dan nirbala dalam mendukung nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, program BULO akan membantu warga Kota Makassar bagaimana cara mengembangkan sebuah usaha di bidang perkebunan dan pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.⁹⁶ Tujuan utama program BULO, mendorong pengembangan lorong menjadi kurang lebih 7.000 lorong sebagai lorong produktif kelanjutan master plan restorasi sebuah lorong di Kota Makassar. Selain itu, program BULO juga membantu menciptakan pengendalian inflasi sektor konsumsi rumah tangga.

Dalam hal ini, Badan Usaha Lorong hampir sama dengan Lorong Garden yang sama-sama tujuan utamanya penghijauan lorong dibawah pengawasan dan kelola Pemerintah Kota, Cuma perbedaan dari Bulog itu sendiri terletak pada anggaran dan pasarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amran Barang S.sos selaku KASI PEM.& Trantib Kelurahan Pa'baeng-baeng :

*“ Sebenarnya Lorong Garden itu tujuan utamanya bagaimana lorong itu indah dipandang mata melalui keterampilan warga, disamping menanam cabe, terong dan sayuran lainnya yang variatif melalui penyuluhan dari binaan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) melalui anggaran yang dibudget. Jikalau memang dari hasil panen ada yang bisa di jual, maka bernilai ekonomi bagi warga. Sedangkan program Bulo itu sendiri anggaran langsung ketangan warga , warga dapat memilih bibit apa yang cocok untuk ditanamkan dilingkungan mereka. Tujuan utama dari Bulo ini adalah menciptakan usaha lorong yang sudah memiliki pasar sendiri yang langsung bisa dijual , beda dengan Lorong Garden yang masih bingung akan di jual kemana”.*⁹⁷

⁹⁶ Berita Sulsel.Com. Tujuan Pembentukan Program Bulo Makassar. Diakses Melalui Internet Pada Tanggal 28 Juni 2017 Pukul 23:08 Wita.

⁹⁷ Wawancara: Amran Basang S.Sos selaku KASI PEM.& Trantib Kelurahan Pa'baeng-baeng pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 11:20 Wita.

Dengan adanya wacana bahwa akan diadakannya lagi program baru yaitu Badan Usaha Lorong (Bulo) , maka tidak menutup kemungkinan dari perbedaan dua program tersebut akan semakin memperlambat implementasi kebijakan Lorong Garden ini karena memiliki karakter masing-masing.

Dalam sebuah agenda pemerintah yang berisikan kebijakan atau program untuk menyelesaikan persoalan sosial dimasyarakat, terkadang pemerintah tidak sadar ataupun kelewatan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan ataupun program, sehingga membuat kebijakan tersebut saling tumpang tindih dan dapat membangun persepsi masyarakat bahwasanya kebijakan pemerintah itu tidak konsisten dan sebagainya. Kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Hal itu terlihat dari lambannya pemerintah dalam menjalankan program Lorong Garden yang dicanangkan dari tahun 2015 hingga sekarang ini masih sangat kurang bahkan masih banyak masyarakat tidak mengetahui program Lorong Garden.

Kebijakan Pemerintah yang kurang sosialisasi, kurang pemberdayaan, apatisnya masyarakat serta tumpang tindih kebijakan menjadi salah satu faktor yang memperlambat kinerja implementasi kebijakan program Lorong Garden . Walaupun Karakter atau isi dari program Badan Usaha Lorong yang dicanangkan Pemerintah itu hampir sama dengan program Lorong Garden, akan tetapi pemerintah tidak memperhatikan karakter masyarakat serta berbagai fasilitas, sarana dan anggota/personil pelaksana kebijakan yang ada pada setiap sasaran program itu sendiri. Belum meratanya perilaku masyarakat yang baik dalam merespon program Lorong Garden serta sosialisasi pemerintah kemasyarakat, akan tetapi muncul lagi program Badan Usaha Lorong yang semakin membuat

implementor kebijakan dalam hal ini Intansi yang bertanggung jawab serta pemerintah kelurahan semakin kualahan.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yaitu bapak Hasribuddin Lurah selaku Ketua RT 005 RW 008 Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

*“ Sebenarnya Lorong Garden itu bagus sekalimi. Karena Lorong Garden program Walikota Makassar masalah pembenahan lorong menjadi indah, bersih dan nyaman. Cuma penerapannya dilapangan itu sangat kurang, baik dari segi sosialisasi, contoh di RT 005 ini wacananya mau dilaksanakan Lorong Garden tapi sampai sekarang belum pernah datang tim mereka untuk melihat dulu kondisi lorong kami, malah dibuat lagi program baru yang sebenarnya samaji Cuma ada penampungnya kalau panen, karena untuk program seperti itu tidak bisa asal pasang. Perlu adanya kecocokan lahan, bibit dan sebagainya. ”.*⁹⁸

Komitmen, konsisten dan fokus terhadap sebuah kebijakan atau program pemerintah dalam implementasi program Lorong Garden merupakan sesuatu yang penting sebagai aparat pemerintah. Karena kebijakan yang dikemukakan Edi Suharto bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁹⁹ Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang terencana secara konsisten dan tidak mencampur adukkan setiap program sehingga program Longgar tersebut bisa berjalan dengan baik Karena indikator keberhasilan program ini adalah Masyarakat Kota Makassar merasa puas terhadap pembenahan lorong ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap program ini dapat diukur keberhasilannya dalam mensejahterakan masyakarat, namun akan tetapi ketumpang-tindihan kebijakan

⁹⁸ Wawancara: Hasribuddin Lurah, Selaku Ketua RT 005 diKelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar . Pada tanggal 27 Desember 2016.

⁹⁹ Miftahul jannah. Dkk. *Implementasi Kebijakan Larangan Parkir DiBahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Makassar*, Jurnal. (Makassar: Universitas Muhamadiyah), h.240.

Longgar di Kelurahan Pa'baeng-baeng, semakin jauh dari harapan masyarakat untuk merasakan keberhasilan program Lorong Garden Tersebut.

Dari hasil pengelompokan diatas, maka dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate terhadap Kebijakan Walikota Makassar tentang Lorong Garden itu sangat bervariasi tergantung bagaimana sudut pandang dan tingkat pemahaman, pengetahuan masyarakat itu sendiri dengan Lorong Garden.

Berdasarkan persepsi serta pemahaman masyarakat diatas yang bervariasi maka penulis berkesimpulan bahwa Lorong Garden adalah sebuah Kebijakan atau Program Walikota Makassar yang dimana ingin merubah lorong menjadi bersih, indah, cantik dan terampil dengan memanfaatkan lahan dilorong-lorong yang ada di setiap kecamatan. Namun kurangnya sosialisasi, tidak adanya pemberdayaan, apatisnya masyarakat serta munculnya program baru sebagai tumpang tindihnya kebijakan menjadi penyebab ketidakmaksimalan berjalanya program ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti akhirnya dapat mengambil kesimpulan akhir dari penelitian ini. Sebagai berikut:

1. Lorong Garden adalah program Walikota Makassar yang ingin mengubah lorong menjadi hijau, indah, bersih, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat lorong dengan kegiatan keterampilan berkebun. Namun dalam implementasi kebijakan “Lorong Garden” di Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate yang peneliti teliti dilapangan dalam hal ini masih terdapatnya beberapa kendala dan kekurangan yang harus di perbaiki, seperti masih kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat, minimnya anggaran yang diberikan, kurang aktifnya instansi yang bertanggung jawab sebagai teknis dalam hal ini berkaitan dengan swadaya implementor yang kurang personil, tidak konsisten, saling ketergantungan, tidak terlalu memadainya sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang sehingga implementasi belum berjalan dengan baik dan merata.
2. Persepsi Masyarakat Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate tentang Lorong Garden sangat bervariasi, mulai dari pemahaman bahwa Lorong Graden merupakan program yang ingin mengubah lorong menjadi bersih, hijau, indah, asri dan bernilai ekonomi dan masih banyak masyarakat yang kurang paham atau mengerti akan istilah Lorong Garden dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi seperti kurangnya sosialisasi,

kurangnya pemberdayaan, informasi dan perhatian pemerintah setempat. Namun penulis berkesimpulan bahwa Lorong Garden merupakan Program Pemerintah yang ingin mengubah Lorong menjadi asri dan bernilai ekonomis yang secara tidak langsung dapat juga merubah atau memperbaiki perilaku masyarakat melalui keterampilan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui pengawan pemerintah dan swadaya masyarakat itu sendiri .

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis merekomendasikan implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam struktur birokrasi pemerintah sebagai penanggung jawab melalui instansi yang terkait dengan Program Lorong Garden ini agar lebih serius, konsisten, aktif bersosialisasi dan tidak saling ketergantungan dalam pengimplementasian dilapangan. Dan dapat mempercayakan langsung kepada masyarakat baik berupa anggaran dan lahan dalam mengelola lorong mereka masing-masing dalam hal ini memberdayakan masyarakat.
2. Apatisme sebagian masyarakat yang menjadi salah satu faktor ketidakmerataan dan penghambat dalam pembenahan Lorong Garden ini. Diharapkan respon dan semangat masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal ini berupa swadaya sehingga apa yang diinginkan dalam berkehidupan berbangsa yang aman , sehat, damai dan sejahtera melalui lingkungan yang indah dapat tercapai secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit, 2004.
- Al Fatih, Andy. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Unpad Press, 2010.
- Armin, Mutmainna. *Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Jumlah Pembelian Telur Ayam Buras di Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar*. Makassar, Skripsi, 2014.
- Azikin, Yamlikh, Dkk. *Komunikasi Partisipatif Aparat Kelurahan Dalam Mendukung Makassar Kota Dunia Melalui Program Kebersihan Lingkungan "Makassarta' Tidak Rantasa'". Jurnal*, Makassar, Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. XI. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*, Makassar, Areso, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Gafur, Abdul. *Memfaatkan Pekarangan Mendukung Program Lorong Garden (Longgar)*, Dalam Materi Pelatihan. Makassar, Kantor Katahanan pangan, 2015.
- Gobel, Erwin Zubair dan Yosef.P.Koton, *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Hikmat, Mahi.M., M.Si. *Komunikasi Politik, Teori dan Praktik*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Horison, Lisa. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta, Kencana, 2009.
- James A.Black & Jean J.Champion. *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Jannah, Miftahul. Dkk. *Implementasi Kebijakan Larangan Parkir DiBahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Makassar, Jurnal*. (Makassar: Universitas Muhamadiyah), h.240.

- Jurdi, Syarifuddin. *Ilmu Politik Profetik*. Makassar, Lab. Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar, 2015.
- Landriany, Ellen. *Implementasi Kebijakan Adiwijaya Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang*. Jurnal, Malang, SMA Negeri 10 Malang, 2014.
- Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Makassar, Alauddin university Press, 2013.
- Muslimin, Nurul Qolbi Wulansari. *Implementasi Peraturan Desa No.1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat Di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.
- Nasution. Mahmud L. *Gangguan Persepsi Sensori. Hilusinasi Pendengaran*. USU, Digital Library, 2005.
- Nur, Novri Ardi Wiranata. *Analisis Pelaksanaan Program Makassar' Tidak Rantasak Di Kota Makassar*. Skripsi, Makassar, Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Hasanuddin, 2015
- Pratiwi, Handayani Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota Makassar Terhadap Kebijakan Makassar Tidak Rantasa' Di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala*. Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Putra, Tedi. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di Kepulauan Taka Bonerate*. Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.
- Rakhmat, Jalalluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003.
- S. Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Cet. I. Bandung, Tarsito, 1996.
- Sabir, Muhammad. *Pandangan Kesehatan Dalam Islam, Suatu Pendekatan Hadis*. Makassar, Alauddin University Press, 2014.
- Singkoh, Frans C. *Peran Elit Politik Dalam Proses Penetapan Kebijakan Publik di DPRD Kota Manado*. Manado: Jurnal Eksekutif, 2012.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* . Bandung, Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XI, Bandung, Alfabeta, 2010.

Suyanto, Bagong ,Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana Prenada, 2005.

Syafiie dkk. *Hukum Etika Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta,2001.

Tahir, Arifin. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Di Kota Gorontalo*. Jurnal, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Tumanggor, Rusmin , Dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta, Kencana, 2010

Wahab, Solichin Abdul, M.A, *Analisis Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005.

Widodo. *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Winamo, Budi. , MA. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta, MedPress, 2007.

Yuli Tirtariandi El Anshori, Dkk. *Kebijakan Publik Yang Partisipatif dan Komunikatif*. Banten: FISIP Universitas Terbuka, 2011.

Sumber Internet:

Berita Sulsel.Com. *Tujuan Pembentukan Program Bulo Makassar*. Diakses Melalui Internet Pada Tanggal 28 Juni 2017 Pukul 23:08 Wita.

[Www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/23/oimtl5318-lorong-indah-itu-bernama-lorong-garden-makassar](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/23/oimtl5318-lorong-indah-itu-bernama-lorong-garden-makassar). Diakses melalui internet Pada Tanggal 01 Agustus 2017, pukul 23.10 Wita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar. 1



Gambar. 1: Dokumentasi observasi Lorong Garden di salah satu Lorong diKelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

Gambar. 2.



Gambar. 2 : Dokumentasi Kondisi tembok dan tanaman cabe yang tidak terawat.

Gambar. 3.



Gambar. 3 : Dokumentasi pemukiman lorong yang tidak tersentuh Lorong Garden.

Gambar. 4



Gambar.4 : Dokumentasi wawancara bersama Ibu Rahmانيar selaku Salah satu Pimpinan Di Kantor Dinas Ketanan Pangan tepatnya di Kantor Walikota Makassar.

Gambar.5



Gambar.5 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Arief S.H selaku Kepala Kantor Lurah Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate pada Tanggal 27 Desember 2016.

Gambar. 6

Gambar. 6: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Amran S.Sos, selaku KASI Pembangunan & Trantib Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

Gambar. 7

Gambar.4: Wawancara perbandingan Bersama Ibu Hadrah selaku Ketua RT 002 RW 005.

Gambar. 8



Gambar. 5: Wawancara bersama Bapak Hasribuddin Lurah selaku masyarakat yang kebetulan aklamasi dalam pemilihan ketua RT 005 RW 008 baru ini.

Gambar 9



Gambar 9: Wawancara dengan Ibu Sundari Sulaiman Selaku Kabid Pertanian Pada tanggal 06 Agustus 2017 Pukul 11.00 Wita.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Rahmat lahir di Malaysia pada saat perantauan kedua orang tua pada tanggal 30 September 1993, penulis adalah anak ke 1 dari 5 bersaudara. Penulis melalui pendidikan formal di SD Inpres Jongaya II Makassar dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat SMP Pembangunan Makasar tamat pada tahun 2009 dan kemudian lanjut SMK Negeri 1 Makassar mengambil jurusan Akuntansi hingga tahun 2012. Pada Tahun Yang sama , penulis bekerja di PT.Lotte Shopping Indonesia diberbagai divisi sebagai karyawan permanent sampai sekarang. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik dari tahun 2013 sampai tahu 2017. Selain pendidikan formal penulis juga pernah bergabung disalah satu organisasi intra Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar yaitu Internasional Black Panther Karate , Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar dan Organisasi Ekstra yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Gowa pada tahun 2013.